



Puri Kauhan Ubud

ပုရိကောဟုနီကောဟုနီ
www.purikauhanubud.org

AAGN ARIDWIPAYANA TANDUR TARU URIP

MENGAJAR KUAT, MENJULANG TINGGI



AAGN ARI DWIPAYANA

TANDUR TARU URIP

MENGAJAR KUAT, MENJULANG TINGGI

**Kumpulan Orasi Ilmiah AAGN Ari Dwipayana
tentang Ilmu Pengetahuan, Agama, dan Budaya**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

TANDUR TARU URIP

MENGAJAR KUAT, MENJULANG TINGGI

Kumpulan Orasi Ilmiah AAGN Ari Dwipayana
tentang Ilmu Pengetahuan, Agama, dan Budaya



Penulis

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

Editor

Putu Eka Guna Yasa

Photo

I Dewa Ayu Putu Teguh Mahasari
Relief Candi Prambanan

Desain

MD Gofar

Cetakan Pertama, Agustus 2026

ISBN : 978-634-96483-2-5

130 hal : 14,8 × 21 cm

Diterbitkan oleh :

Yayasan Puri Kauhan Ubud

Jl Raya Ubud No.35, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia,
80571

www.purikauhanubud.org

email : info@purikauhanubud.org



Pengantar Penulis

Mengakar Kuat, Menjulung Tinggi bukan sekadar judul buku. Ia merupakan keyakinan yang tumbuh dari perjalanan panjang saya menekuni dunia akademik, mengabdikan dalam pemerintahan, serta berkecimpung dalam pelestarian agama dan kebudayaan. Semakin luas pengalaman yang saya jalani, semakin saya memahami bahwa kemajuan yang tidak berakar akan mudah kehilangan arah, sementara tradisi yang tidak bertumbuh akan perlahan kehilangan makna.

Perjalanan bangsa-bangsa besar menunjukkan satu pelajaran penting. Mereka mampu menjadi pelopor peradaban bukan karena meninggalkan akar sejarahnya, melainkan karena mampu mentransformasikan warisan nilai menjadi energi untuk menghadapi masa depan. Jepang bangkit dengan semangat bushidō, India membangun masa depannya di atas peradaban yang telah berusia ribuan tahun, Tiongkok kembali meneguhkan identitas kebudayaannya di tengah modernisasi. Indonesia pun memiliki modal yang tidak kalah besar: kekayaan agama, budaya, pengetahuan lokal, dan falsafah kebangsaan yang telah menempa perjalanan sejarah Nusantara selama berabad-abad.

Pertanyaannya, mampukah kita menjadikan seluruh kekayaan itu sebagai fondasi bagi masa depan?

Kegelisahan itulah yang melatarbelakangi seluruh orasi ilmiah yang terkumpul dalam buku ini. Di dalamnya saya berbicara mengenai hubungan agama dengan sains dan teknologi, dinamika gerakan Hindu Indonesia, pentingnya moderasi dan kebijaksanaan, tantangan disrupsi, pendidikan, kepemimpinan, hingga aktualisasi ilmu melalui pengabdian. Sekilas tema-tema tersebut tampak berbeda. Namun sesungguhnya semuanya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana membangun manusia dan peradaban yang tetap berakar pada nilai, namun mampu menjawab tantangan zaman.

Sebagai akademisi, saya meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Sebagai insan yang tumbuh dalam tradisi Hindu Bali, saya percaya bahwa ilmu tanpa Dharma dapat kehilangan arah. Sebagai warga negara yang pernah memperoleh kesempatan berada di ruang pemerintahan, saya belajar bahwa gagasan yang paling baik sekalipun baru akan bermakna apabila mampu diwujudkan menjadi kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Karena itu, saya tidak pernah melihat ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan sebagai tiga dunia yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling menghidupi. Ilmu memberikan kemampuan untuk memahami dunia. Agama memberi orientasi moral dan spiritual. Kebudayaan menjadi ruang tempat nilai-nilai itu hidup, diwariskan, dan terus diperbarui.

Dalam perspektif Hindu, perjalanan menuju kebijaksanaan tidak berhenti pada *widyā* sebagai pengetahuan. Pengetahuan harus bertumbuh menjadi *wiweka*, melahirkan *jñāna*, kemudian bermuara pada *wicakṣaṇa*—kebijaksanaan yang mewujudkan dalam tindakan. Pada titik itulah ilmu berubah menjadi pengabdian, dan pengetahuan menjelma menjadi kemanfaatan bagi sesama.

Buku ini juga merupakan ajakan untuk membaca kembali warisan intelektual Nusantara. Terlalu lama kita memandang modernitas sebagai sesuatu yang sepenuhnya datang dari luar, sementara khazanah pengetahuan sendiri hanya ditempatkan sebagai romantisme masa lalu. Padahal, manuskrip-manuskrip Nusantara, pemikiran para leluhur, dan praktik kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat menyimpan sumber inspirasi yang luar biasa untuk membangun masa depan. Tradisi bukanlah museum. Tradisi adalah laboratorium peradaban.

Saya percaya bahwa Indonesia membutuhkan generasi yang mampu berdiri tegak di atas dua kaki sekaligus: satu kaki menghunjam kuat pada akar nilai, sejarah, dan kebudayaan; kaki lainnya melangkah mantap memasuki dunia yang semakin terbuka, kompetitif, dan sarat inovasi. Bangsa yang kehilangan akar akan mudah tercerabut oleh arus globalisasi. Sebaliknya, bangsa yang menolak perubahan akan tertinggal oleh sejarah.

Sebagian besar tulisan dalam buku ini berasal dari orasi ilmiah. Karena itu, pembaca mungkin menemukan beberapa pokok pikiran yang muncul berulang. Saya memilih mempertahankannya karena saya percaya bahwa ada nilai-nilai yang memang harus terus diulang, sebagaimana seorang guru tidak pernah lelah mengingatkan murid-muridnya tentang pentingnya kejujuran, integritas, pengabdian, dan kasih sayang.

Saya juga menyadari bahwa tidak semua gagasan dalam buku ini akan disepakati. Memang bukan itu tujuannya. Buku ini tidak dimaksudkan menjadi penutup perdebatan, melainkan pembuka percakapan. Ilmu pengetahuan berkembang melalui dialog, kritik, dan kesediaan untuk terus belajar. Peradaban tumbuh bukan karena keseragaman pikiran, melainkan karena keberanian berdialog dalam semangat saling menghormati.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh perguruan tinggi yang telah memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan orasi-orasi ilmiah ini. Terima kasih kepada para guru yang telah menanamkan kecintaan terhadap ilmu, kepada keluarga yang selalu menjadi sumber kekuatan, kepada para mahasiswa yang terus memantik lahirnya pertanyaan-pertanyaan baru, kepada para sahabat seperjalanan dalam dunia akademik, pemerintahan, agama, dan kebudayaan, serta kepada semua pihak yang telah memperkaya perjalanan intelektual saya.

Pada akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk terus merawat akar. Sebab hanya pohon yang berakar kuat yang mampu menjulang tinggi, menghadapi badai, sekaligus memberikan bunga, buah, dan keteduhan bagi kehidupan di sekitarnya. Demikian pula sebuah bangsa. Masa depan hanya akan kokoh apabila dibangun di atas akar pengetahuan, kebudayaan, dan Dharma yang kuat.

Semoga buku sederhana ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar bersama untuk membangun Indonesia yang berkemajuan, berkeadaban, dan tetap setia pada jati dirinya.

Satyam Eva Jayate, Kebenaran pada akhirnya akan selalu menang.

Puri Kauhan Ubud
Purnama Karo, 29 Juli 2026

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana

Pengantar Editor

L'essentiel est invisible pour les yeux

'Sesuatu yang esensial tidak akan terlihat oleh mata'

Pertumbuhan akar sebagai salah satu hal yang esensial dari pohon tidak akan terlihat oleh mata. Akar tidak bekerja dalam riuh dan gaduh, tetapi dalam sunyi dan senyap. Dengan cara kerja itulah akar memperkuat pangkal, memperlebat buah, dan menjulangkan pucuk. Kekuatan akar untuk menembus berbagai lapisan tanah, kerikil, dan bebatuan menjadi dasar ketangguhan pohon untuk melangitkan pucuk. Tanpanya, pohon yang tinggi akan mudah tumbang.

Dengan berguru kepada kearifan pohon, buku ini diberi judul *Tandur Taru Urip: Mengakar Kuat, Menjulang Tinggi*. Judul ini diabdikan untuk mengetuk fajar kesadaran tentang akar pengetahuan yang mesti dipegang kuat untuk meneguhkan ayunan langkah dalam berkiprah setinggi-tingginya di berbagai lanskap kehidupan. Akar pengetahuan itu bersumber dari eksplorasi sains, agama, dan kebudayaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran secara seimbang.

Buku yang memuat sari-sari pemikiran Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana ini sebelumnya pernah disampaikan dalam orasi ilmiah di 5 perguruan tinggi. Kampus-kampus tersebut adalah Universitas Hindu Indonesia (UNHI), UHN I

Gusti Bagus Sugriwa, Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara-Jakarta, Universitas Ngurah Rai, dan Institut Agama Hindu Gde Puja Mataram-Lombok. Dalam berbagai kesempatan itu, tema yang disampaikan saling berkelindan seperti: relasi antara Hindu, sains, dan teknologi; dinamika gerakan dan aktivisme Hindu dalam lintasan sejarah Indonesia; pentingnya membangun masyarakat yang berlandaskan *wiweka-widyā* dan *jñāna-wicakṣaṇa*; gagasan tentang manusia sebagai pusat peradaban; hingga bagaimana ilmu dan amal menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan dalam kehidupan intelektual.

Jelajah Isi Orasi

Orasi ilmiah yang sebagian besar disampaikan di lembaga berspirit agama Hindu ini sejak awal telah mempertanyakan secara kritis posisi agama di tengah-tengah sains dan teknologi. Pertanyaan yang dilontarkan Ari Dwipayana dalam orasi yang bertajuk *Hindu, Sains, dan Teknologi: Menjaga Keseimbangan untuk Kemanusiaan dan Kemajuan Peradaban* ini penting karena di sejumlah negara yang menjadi mercusuar sains dan teknologi di Barat, orang-orang sudah tidak lagi memeluk suatu agama tertentu. Mereka berprinsip, hanya dengan berpegang pada sains dan teknologi maka sebagian besar persoalan kehidupan dapat diselesaikan. Itulah sebabnya, relevansi agama ditantang oleh rasionalitas manusia modern.

Tantangan itu menjadi bermakna ketika kemajuan yang dicapai oleh sains dan teknologi ternyata menyisakan resiko-resiko merugikan. Resiko tersebut adalah keretakan hubungan antara manusia dengan sesamanya yang berujung pada peperangan sebagai bencana kemanusiaan. Termasuk pula keretakan relasi antara manusia dengan alam yang bermuara pada eksploitasi

berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam. Di titik inilah sains dan teknologi tidak bisa berdiri hanya dengan satu kaki, tetapi membutuhkan agama untuk melengkapinya. Agama dengan berbagai kekayaan pengetahuan keilahianya dapat menjadi generator untuk melahirkan dan memperbesar rasa welas asih sehingga berbagai keretakan tersebut bisa direkatkan.

Terlebih, agama Hindu yang memiliki sumber-sumber literasi kuno seperti *Tantu Panggĕlaran* menunjukkan bahwa relasi antara sistem pengetahuan tentang Ketuhanan sejatinya inheren dengan kemajuan sains dan teknologi. Dalam teks yang mendaras proses penciptaan peradaban di Nusantara ini, secara simbolis para dewata diutus untuk mengajarkan manusia berbagai keterampilan hidup. Kehadiran para dewata seperti Brahmā, Mahādewa, Hyang Wiśwakarma dan seterusnya yang diutus oleh Śiwa ntuk mengajarkan manusia cara membuat peralatan hidup, mengolah tata ruang, dan membuat berbagai perhiasan adalah simbol karakter teknokrasi yang mendorong perkembangan masyarakat secara signifikan. Mengacu pada pustaka ini, agama sesungguhnya memiliki peran untuk berkontribusi pada sains dan teknologi terutama pada tiga hal, yaitu rasa, etik, dan tujuan untuk mencapai kebahagiaan serta harmoni lahir batin (*jagadhita*).

Meskipun memiliki sumber literasi yang penuh dengan nilai kebajikan dan sejarah panjang di Nusantara sebagai agama yang pernah dianut pada masa lalu, pengakuan terhadap agama Hindu sebagai insitusi formal pascakemerdekaan di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata mengalami berbagai hambatan. Dalam orasinya yang berjudul *Keluar dari Pusaran: Aktivisme Hindu dalam Menghadapi Tantangan Masa*

Depan, Ari Dwipayana membahas sejarah aktivisme Hindu dari awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga masa reformasi dengan sangat kronologis dan sistematis. Tulisan ini mengulas dinamika agama Hindu yang tidak jatuh dari langit, tetapi buah perjuangan para pendeta, aktivitis, dan intelektual organik Bali.

Kegelisahan mereka ini bahkan sudah muncul sebelum kemerdekaan, tepatnya pada masa bercokolnya kolonialisme Belanda di Bali. Para kaum terpelajar Bali merasa terganggu karena sebagian kalangan birokrat dan misionaris itu memandang agama Bali sebagai Paganisme (Animisme-Dinamisme), termasuk berbagai pertanyaan seputar keberagaman nama agama, dan kitab suci kanon sebagai rujukan ortodoksi. Meskipun, sebagian di antara orientalis Belanda sendiri menolak pandangan tersebut dan bersikap untuk melestarikan agama ini sesuai dengan kesejatiannya. Sikap ini termanifestasi dalam kebijakan Belanda yang kemudian mendirikan Gedong Kirtya pada tahun 1928 dan menerbitkan majalah Bhawanagara sebagai usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih terang tentang alam pikir agama Bali melalui peninggalan manuskrip-manuskripnya. Di luar itu, kelompok-kelompok aktivitis mulai berdiri di Bali seperti Eka Laksana, Bali Dharma Laksana, dan yang lainnya termasuk perkumpulan para pandita Bali untuk meredefinisi identitas agama Bali. Pada saat yang bersamaan, mereka juga bertujuan untuk memproteksi gelombang konversi agama yang tengah terjadi di Bali.

Pada masa kemerdekaan, perjuangan ternyata belum usai. Syarat-syarat Kementerian Agama yang mengeluarkan aturan untuk pengakuan agama secara eksklusif khas paham agama-agama Abrahamik, termasuk penekanan pada *scriptural* (agama

kitab), dan universalis memberi ruang yang menantang pada pengakuan agama Bali. Menyikapi situasi ini, pendekatan politis dan akademis ditempuh. Pendekatan politis berfungsi untuk menyediakan wadah-tubuh resmi berupa pengakuan negara (aspek *pradhana*), sedangkan gerakan akademis berupa pengisian substansi-jiwani (aspek *purusha*). Berbagai pendekatan politis itu dilakukan sampai akhirnya pertemuan dengan Soekarno membuahkan hasil berupa pembentukan bagian Hindu Bali di Kementerian Agama RI pada tahun 1958 yang diikuti dengan pendirian kantor agama di daerah tingkat I Bali. Di sisi lain, pendekatan akademis juga melengkapi perjuangan ini. Goris dengan keluasan bacaannya dalam dunia manuskrip Bali berusaha mencari akar universal agama ini dengan India. Sejumlah pemuda Bali seperti Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Oka Punyatmaja, Tjokorda Rai Sudharta belajar ke India untuk memperjelas relasi agama Hindu sehingga tidak diklaim sebagai agama etnis. Kedatangan Raghu Vira dan Pandit Sastri yang berasal dari India ke Bali harus diakui berperan penting dalam perumusan kanon teologis agama Hindu, yaitu *Panca Sraddha*.

Salah satu capaian penting dari aktivisme Hindu adalah terbentuknya Majelis Agama Hindu yang menjadi embrio lahirnya Parisada Hindu Dharma Indonesia hari ini. Parisada sebagai Majelis tertinggi agama Hindu berskala nasional, memberi peluang lebih besar bagi kalangan intelektual untuk menyatukan rumusan kanon teologis yang bersifat universal, membakukan bahan ajar agama Hindu serta menstandarisasi sistem ritual yang berlaku di berbagai tempat di Indonesia. Otoritas ini jelas menjadi arena pergulatan baru bagi silang kepentingan berbagai kelompok Hindu yang ada. Ari Dwipayana dengan jeli melihat pusaran diskursus dan potensi konflik yang ada di dalam tubuh lembaga yang populer dengan sebutan PHDI ini. Pusaran tersebut

terkait (1) *power structure*; (2) isu representasi (keterwakilan; (3) independensi; dan tarik-menarik di antara arus besar yaitu Hindu lokal (Bali), Hindu Nasional (Parisada), dan Neo-Hinduisme-India. Meski dinamika akan terus terjadi di dalam tubuh PHDI, Ari Dwipayana mengajak kita untuk melihat akar rumput gerakan Hindu di berbagai pelosok Indonesia seperti Kalimantan, Tana Toraja, dan Gunung Kidul yang muncul atas kesadaran sendiri. Tapak-tapak perjuangan individu dengan kelascaryan itu ternyata juga berdampak di tanah yang mereka pijak.

Selanjutnya, tantangan yang mengkanvasi dinamika umat Hindu di Indonesia juga berhubungan dengan isu intoleransi. Terlebih secara demografis, penduduk Hindu nasional termasuk kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam orasinya yang berjudul *Menuju Pencapaian Wiweka-Widyā, Jñāna-Wicakṣaṇa*, Ari Dwipayana mengidentifikasi bahaya laten yang ditimbulkan oleh radikalisme dengan jubah agama. Legitimasi kebenaran agama yang bersifat absolut cenderung men-subordinasi semua pandangan dan sikap dari kelompok lain. Ketika pandangan dunia tersebut dilengkapi dengan *reward and punishment* yang melampaui batas-batas realitas, hal itu berpotensi memicu sikap dan tindakan destruktif yang membahayakan kehidupan bersama.

Untuk ke luar dari labirin persoalan ini, ia menawarkan jalan tengah sebagai solusi. Untuk menempuh jalan tengah, seseorang harus sampai pada *jñāna-wicakṣaṇa*, ilmu pengetahuan yang diperoleh harus mau dan mampu dibawa ke pemikiran moderat. Gerakan moderasi beragama ini diwujudkan melalui dua cara, yaitu (1) memperkuat kajian teologis melalui sumber-sumber yang dapat meningkatkan nilai toleransi, keterbukaan, dan kemanusiaan; serta (2) menyuarakannya secara lantang

melalui kampanye di ruang publik sebagai bentuk *counter-hegemony* untuk membangun tradisi moderasi, toleransi dan inklusivitas baik intraagama maupun lintas agama. Dua strategi ini akan efektif dalam mencapai tujuannya apabila dilandasi oleh persatuan. Menariknya, persatuan itu sendiri dijiwai oleh pengakuan terhadap perbedaan.

Tidak hanya membahas persoalan agama, dalam kesempatan selanjutnya Ari Dwipayana juga menyampaikan isu aktual yang tengah terjadi di berbagai ranah kehidupan, yaitu era disrupsi. Dalam orasinya yang berjudul *Menjadi Manusia Tattwa*, ia menjelaskan bahwa disrupsi yang dimaknai sebagai ketercerabutan mengguncang kemapanan sejumlah sektor, termasuk dunia pendidikan. Situasi ini dimotori oleh rangkaian Revolusi Industri 4.0 dan diartikulasi oleh Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada pengetahuan dan keterampilan. Ada pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting, kini menjadi usang dan tidak lagi relevan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan, diperkirakan akan punah, tergusur oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa untuk bisa adaptif dalam situasi ini, peningkatan literasi atau *śāstra* saja tidak cukup. Sebab, literasi harus ditransformasikan menjadi budaya etik atau *śāstra paraga*. Sehingga ditahap akhirnya, literasi yang menubuh dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan dapat dijadikan tongkat untuk menyelesaikan persoalan hidup bersama, bahkan dalam pengambilan keputusan atau *śāstra dṛṣṭa*.

Berbekal pada kesiapan inilah seseorang dapat melihat era disrupsi dengan sudut pandang berbeda, yaitu peluang untuk melakukan inovasi yang seluas-luasnya. Di titik ini, dunia pendidikan adalah altar utama penyelarasan pola hidup baru di

tengah dunia yang berubah dengan cepat. Maka, kemerdekaan belajar yang digulirkan bisa menjadi katalisator untuk mempercepat pencapaian *manusia tattwa* yang mahardika atau 'manusia yang seutuhnya'.

Selaras dengan usaha untuk mencapi manusia yang unggul dan manusia yang seutuhnya (*manusia tattwa*), Ari Dwipayana melengkapi anjangsana akademisnya dengan satu orasi berjudul Aktualisasi Ilmu dan Amal. Ilmu yang dicari dengan susah tidak akan pernah bermanfaat sepenuhnya apabila belum diamalkan untuk hidup dan kehidupan. Sama seperti panah *paśupatiśāstra* yang diraih oleh Arjuna melalui tapa brata mahabherata pada akhirnya disempurnakan oleh amal pengabdianya dengan menegakkan kebenaran di dunia (*katalyan śih*).

Hal yang sama juga sejatinya dilakoni oleh pejuang kemerdekaan dari Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Ia adalah figur serupa Arjuna di zaman kita yang tahu betul bahwa ilmu kepemimpinan, pertahanan, dan kemiliteran tidak akan berarti apa-apa sebelum diamalkan di medan pertempuran. Ngurah Rai yang terkenal non-kompromis terhadap Belanda membuktikan seluruh pengetahuan terbaiknya demi amal kemerdekaan terhadap bangsa dan negara yang dicintainya, yaitu Indonesia. Keteladanan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan *Ciung Wanara*-nya sudah seharusnya senantiasa menyala di nyali anak bangsa.

Refleksi

Itulah selang pandang isi orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ari Dwipayana sebagai ikhtiar intelektual untuk membaca zaman, merawat tradisi, dan merumuskan arah masa depan. Salampah laku hidup yang lahir dan tumbuh di Bali memungkinkannya untuk

mengetahui akar-akar literasi Bali dan kearifan Nusantara yang dalam. Sementara itu, karier sebagai akademisi yang dilakoni di Jogjakarta dan tapak perjalanan sebagai koordinator staf khusus presiden RI di Jakarta pasti membuat sudut pandang orasi-orasi ini menjadi semakin luas, objektif, dan peka untuk menawarkan solusi atas berbagai isu yang dibahas.

Yang menarik dari tulisan-tulisan dalam buku ini adalah upaya Ari Dwipayana untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara tradisi dan modernitas, spiritualitas dan rasionalitas, dan akar lokal dengan cakrawala global. Dalam jembatan itulah tumbuh keyakinan bahwa kemajuan tidak harus dibayar dengan kehilangan jati diri, dan kebudayaan justru dihidupkan dengan memberi celah pada perubahan.

Kumpulan orasi ini lahir dari konteks ruang dan waktu khusus, membawa nuansa lisan, dan sering kali memuat refleksi yang mengalir mengikuti dinamika audiens. Pengulangan sejumlah hal pun tidak terhindarkan karena memuat aspek pemikiran yang dinilainya penting untuk disuarakan dengan lantang dalam setiap kesempatan. Oleh sebab itu, kami berupaya menjaga keutuhan gagasan dan suara penulis, sembari melakukan penyuntingan untuk memperkuat alur, konsistensi bahasa dan ejaan, tanpa mengurangi spirit yang melatarinya.

Buku ini pada akhirnya tidak dimaksudkan sebagai *wasana wākyā* kata akhir atas berbagai persoalan yang dibahas, melainkan sebagai undangan untuk melanjutkan dialektika dan dialog. Hanya dengan cara inilah roda cakra pengetahuan (*widyā cakra prawartana*) dapat diputar. Pada saat yang bersamaan, buku ini dapat dimaknai sebagai sebuah ajakan agar ilmu pengetahuan tidak tercerabut dari etika, agar agama

tetap terbuka terhadap dialog, dan agar kebudayaan terus hidup sebagai energi peradaban. Semoga buku ini bermanfaat dalam memperluas cakrawala berpikir, serta menjadi pemantik diskusi baru yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan, agama, budaya, dan masa depan kemanusiaan.

Siddhir astu.

Maison des Étudiants Arméniens, Paris

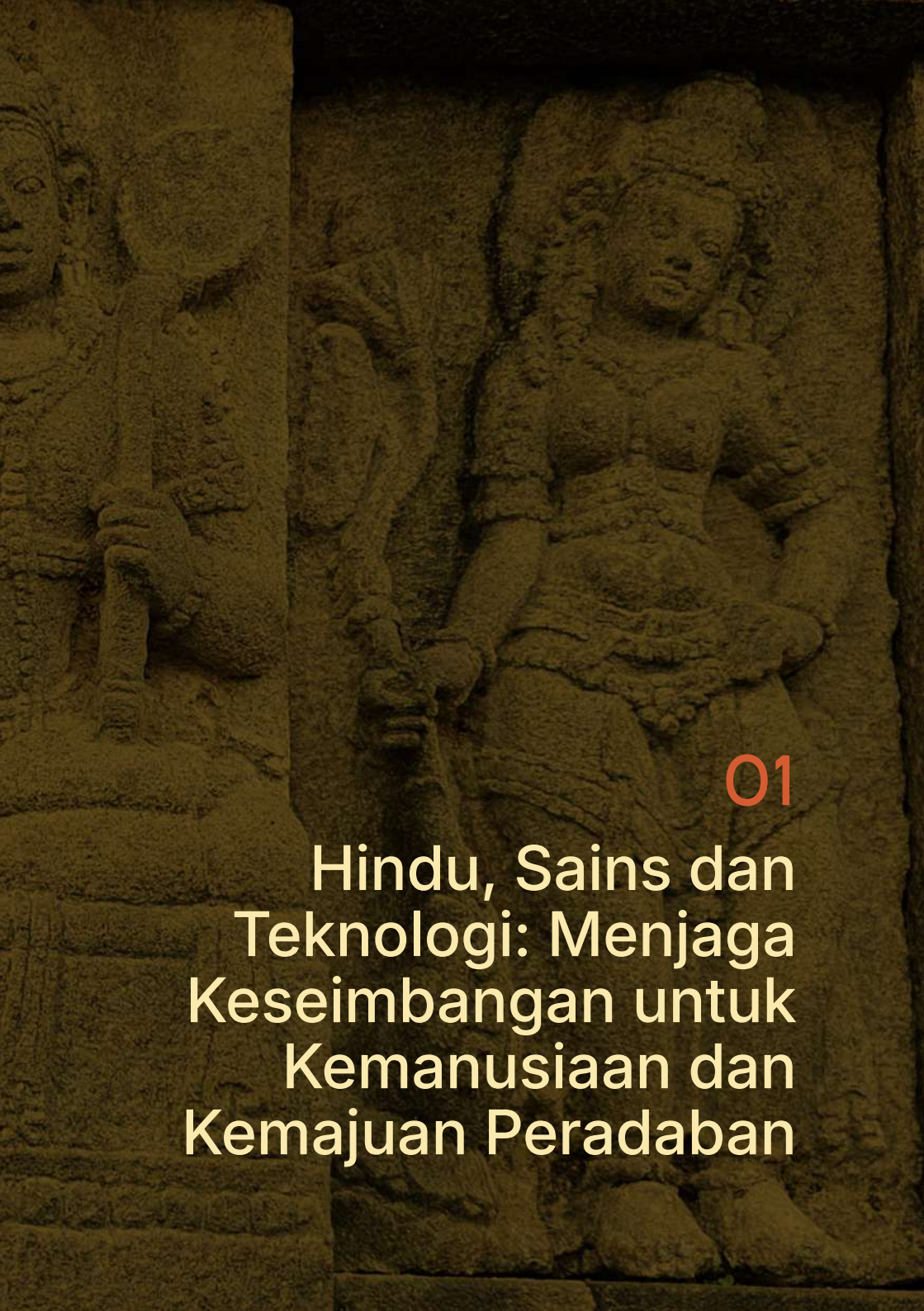
Putu Eka Guna Yasa

Daftar Isi

Pengantar Penulis	7
Pengantar Editor	12
Hindu, Sains dan Teknologi: Menjaga Keseimbangan untuk Kemanusiaan dan Kemajuan Peradaban	26
• Dilema Modernitas	
• Diskursus Manusia Modern	
• Iptek dalam Tradisi Bali	
• Menyambungkan Sains dan Tradisi	
• Memuliakan Kemanusiaan	
Keluar dari Pusaran: Aktivisme Hindu dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan	42
• Benteng Perlindungan	
• Penamaan Agama Bali	
• Memperjuangkan Pengakuan Negara	
• Pergulatan Perumusan Hindu Nasional	
• Invensi Kelembagaan	
• Kembali ke Dalam Pusaran	
• Kembali Melihat Akar Rumput	
• Catatan Penutup: Keluar dari Pusaran	

Menuju Pencapaian Wiweka-Widya, Jnana Wicaksana	78
• Nyisik Bulu • Menciptakan Kewarasan • Memoderasi Ruang Publik • Membumikan Gerakan Moderasi • Persatuan sebagai Syarat Mutlak Kemajuan	
Menjadi Manusia Tatwa	94
• Gelombang Disrupsi • Inovasi dan Perubahan • Pendidikan sebagai Penyelaras Perubahan • Kampus Merdeka • Merawat Kemanusiaan • Menjadi Manusia Seutuhnya	
Aktualisasi Ilmu dan Amal	110
• Ilmu, Kebajikan dan Amal • Ilmu sebagai Energi Perjuangan • Menjadi Intelektual Organik • Belajar, Berjuang Tanpa Henti	
Daftar Pustaka	122
Data Penulis	125





01

Hindu, Sains dan Teknologi: Menjaga Keseimbangan untuk Kemanusiaan dan Kemajuan Peradaban

Hindu, Sains dan Teknologi: Menjaga Keseimbangan untuk Kemanusiaan dan Kemajuan Peradaban¹⁾

Tema Agama dan Sains bukanlah hal baru. Perdebatan sudut pandang bisa kita temukan jejaknya sangat panjang, Agama dan Sains seolah menjadi dua sisi dalam sekeping mata uang, yang saling berdampingan sekaligus berseberangan. Pendekatan materialisme dan empirisisme modern kerap dipertentangkan dengan pandangan keagamaan yang cenderung idealis dan normatif.

¹⁾ Disampaikan dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, 04 Oktober 2021

Abad ke-5 SM, masyarakat Athena mengecam Filsuf Anaxagoras yang menilai matahari dan bulan sebagai bola- bola besar di angkasa. Itu bertentangan dengan pandangan mayoritas masyarakat waktu itu, yang meyakini bulan dan matahari sebagai Dewa-dewa. Anaxagoras pun hampir dihukum mati kalau tidak ditolong rekan filsufnya, Pericles, untuk melarikan diri ke luar Athena.

Pada abad ke-17, Galileo Galilei menyampaikan kajiannya yang membenarkan temuan Copernicus tentang teori heliosentris, yang bertentangan dengan doktrin geosentris gereja. Hasilnya, Galileo dihukum menjalani tahanan rumah hingga meninggal dunia.

Baik Anaxagoras maupun Galileo adalah potret ilmuwan yang terbentur kekakuan otoritas agama, yang doktrin-doktrinnya mendominasi pandangan sosial pada masanya.

Sekarang situasi sudah berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai capaian yang tak terbayangkan sebelumnya. Interaksi dan komunikasi tanpa batas, transportasi super cepat, sistem produksi massal, bangunan-bangunan pencakar langit, semua merupakan hasil perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi modern.

Saat ini kita hidup di era baru. Era disrupsi teknologi. Teknologi *cloud computing*, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Big Data Analytic*, *Advance Robotic*, *Virtual Reality* telah membawa perubahan di segala bidang. Bahkan pandemi Covid-19, menambah serial disrupsi sebelumnya yang dipicu Revolusi Industri 4.0.

Di tengah arus perubahan zaman yang serba cepat ini, ada yang mulai menyangsikan relevansi agama. Benarkah Sains dan Teknologi lebih unggul, dan agama sudah tidak relevan?

Dilema Modernitas

Meski terbukti menghasilkan berbagai kemajuan, sains dan teknologi juga membawa berbagai masalah. Memberikan tonic, sekaligus menyisakan toxic. Perombakan institusi tradisional secara massif di berbagai belahan dunia menggusur nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam peradaban. Teknologi dan peralatan berat yang digunakan untuk mengeksploitasi alam tanpa terkendali, berpotensi merusak lingkungan dan mewariskan bencana pada generasi mendatang.

Dan yang paling mengerikan, pengembangan teknologi pemusnah massal mengancam kehancuran serius bagi seluruh peradaban yang telah terbangun. Salah satunya, yaitu proliferasi nuklir yang bisa memundurkan peradaban hingga ribuan tahun ke belakang, bahkan bisa membuat manusia punah bersama seluruh kehidupan di muka bumi.

Tanpa mengesampingkan berbagai capaian sains dan teknologi, kita harus mengakui bahwa usia modernitas masih sangat muda. Berbagai risiko serta efek samping dari sains dan modernitas masih sangat mungkin terjadi. Dan kita perlu antisipatif terhadap berbagai kemungkinan buruk tersebut, tanpa harus bersikap paranoid, anti sains atau anti modernitas.

Dilema dan risiko modernitas tersebut tercermin pada surat menyurat yang melibatkan dua ilmuwan besar modern, yaitu fisikawan Albert Einstein dan Bapak Psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam korespondensi yang diterbitkan pada tahun 1933, Einstein menyampaikan kegelisahannya pada Freud, tentang kebiasaan manusia berperang. Bahkan, manusia rela mengorbankan diri dan membahayakan hidup demi peperangan. Dan di tengah

kemajuan teknologi modern, peperangan tersebut membawa ancaman sangat serius dalam skala yang sangat massif.

Menanggapi surat tersebut, Freud menjelaskan bahwa secara naluriah manusia memiliki dua sifat dasar, yaitu insting untuk bersatu dan saling menjaga; serta insting untuk merusak dan membunuh. Dalam bahasa keseharian, keduanya kita kenal sebagai sifat "cinta-kasih" dan "kebencian." Sifat cinta kasih membuat seseorang rela mengorbankan diri demi orang, kelompok, atau obyek lain yang dicintainya. Dan sebaliknya, sifat kebencian mendorong seseorang untuk melakukan agresi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun begitu, Freud juga menggarisbawahi, bahwa insting cinta kasih pun bisa memicu kebencian. Contohnya, seseorang yang mencintai kelompoknya secara membabi buta, bisa memicu kebencian terhadap kelompok lain.

Dalam hal ini Eric Fromm, seorang Psikoanalisis Neo- Freudian membedakan dua jenis cinta kasih, yaitu "keinginan untuk menjadi" dan "keinginan untuk memiliki." Cinta kasih yang dilandasi "keinginan untuk memiliki" lebih rentan tergelincir pada kebencian, dan sebaliknya "keinginan untuk menjadi" lebih mengarah pada harmoni dan keselarasan. Kita bisa menjadi *to be more* dan bukan sekedar dibelenggu oleh hasrat *to have more*.

Pertanyaannya, dari mana sumber insting cinta-kasih untuk "menjadi" tersebut? Bagaimana memunculkan dan memperbesarnya? Inilah yang menjadi kontribusi besar agama-agama dalam peradaban manusia. Agama bukan hanya mengajarkan *Sraddha*, pentingnya *yadnya*, pentingnya pengetahuan untuk membebaskan kita dari kegelapan serta

mengajarkan pentingnya mengolah rasa, sehingga bisa memunculkan welas-asih.

Selama ribuan tahun, norma-norma agama dan tradisi ini menjaga keteraturan dan keutuhan sosial, sekaligus menyediakan fondasi bagi berkembangnya masyarakat modern saat ini.

Memang tidak bisa dipungkiri, perjalanan peradaban manusia juga diwarnai berbagai catatan kelam tentang perbudakan, kerakusan untuk eksploitasi alam dan peperangan. Tapi, juga memiliki catatan tentang kearifan, solidaritas, sikap welas asih, norma kebajikan hingga menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

Hal ini menegaskan pesan moral yang bisa dipelajari dari perbincangan Albert Einstein dengan Sigmund Freud. Kamajuan sains dan teknologi, pada dasarnya adalah sebuah alat atau wahana. Penggunaannya untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada subyek utamanya yakni manusia. Manusia adalah pusat. Disinilah agama-agama bisa berbicara banyak tentang peran profetisnya. Peran profetik untuk membentuk manusia Dewa, bukan manusia Raksasa.

Diskursus Manusia Modern

Terkait wacana manusia sebagai pusat, Titiang tertarik dengan buku karya Ida Bagus Made Dharma Palguna tentang Manusia Tattwa. Empat puluh delapan judul tulisan tentang Manusia yang terangkum di dalam buku ini membicarakan perihal Manusia dari luar sampai dalam.

Buku ini mengajak kita semua tidak melupakan manusia dan kemanusiaan. Karena dari manusia, segala sesuatu bisa berawal, dan juga sekaligus bisa membuatnya semuanya berakhir.

Manusia adalah pusat arah. Sebab manusia adalah pusat, maka segala sesuatu mengada darinya dan meniadakan kepadanya.

Ketika perkembangan sains dan teknologi mulai kehilangan jejak dalam memahami manusia dan kemanusiaannya, kita mulai lepas kendali. Ini memunculkan kritik terhadap perkembangan sains dan teknologi. Bahwa saat ini, kita sedang berada dalam kondisi seperti Juggernaut, kereta besar yang rem-nya blong sehingga kehilangan kontrol yang merusak dan menghancurkan apa yang dilaluinya.

Kritik pedas juga disampaikan oleh Karl Marx yang dalam karya yang berjudul *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, tentang *de-humanisasi*, yang menjadi dasar dari koreksi atas sistem kapitalisme yang melanggengkan alienasi kerja.

Kritik bukan hanya datang dari perspektif kiri, tapi juga dari agama-agama. Dalam berbagai literatur karya Ilmuwan Hindu, banyak dijumpai kritik penting terhadap perkembangan *Modern Science*, khususnya terkait konsep kausalitas. Dengan merujuk Weda, para ilmuwan menekankan bahwa ajaran Weda mengakui tiga penyebab yang mempengaruhi setiap obyek atau kejadian.

Pertama, yaitu penyebab material (*material cause*), yaitu materi atau komponen yang menyusun suatu obyek atau kejadian. Contohnya, kualitas suatu mobil dipengaruhi oleh materialnya, seperti bahan baku, suku cadang, interior, kapasitas mesin, dan sebagainya.

Kedua, setiap obyek juga dipengaruhi penyebab efisien (*efficient cause*), yaitu agen yang menyusun obyek tersebut. Contohnya, kualitas suatu mobil dipengaruhi oleh para engineer yang mendesain hingga merakit mobil tersebut.

Dan **ketiga**, yang tak kalah penting, Weda juga mengakui adanya akar penyebab (*root cause*), di mana setiap *material cause* maupun *efficient cause*, masing-masing memiliki penyebab inti dalam dirinya, yaitu jiwa. Weda memandang bahwa setiap unsur di dunia memiliki jiwa, dan masing-masing memiliki tujuan dan karma-nya di dunia ini, baik itu manusia, hewan, dan semua benda-benda di sekeliling kita.

Dalam contoh kualitas mobil di atas, Ilmu Weda memandang bahwa selain kepiawaiannya, para engineer juga dipengaruhi oleh tujuan jiwanya, dan tujuan keberadaannya saat mendesain mobil. Di sisi lain, materi yang dipakai untuk menyusun komponen mobil juga memiliki jiwa tersendiri yang turut mempengaruhi kualitas mobil.

Keberadaan *root cause* inilah yang absen dalam perspektif sains modern. Di satu sisi, teknologi modern masih mengakui adanya penyebab materi (*material cause*) dan penyebab efisien (*efficient cause*), tapi tidak mengakui *root cause*. Bahkan, banyak teori dalam ilmu modern hanya mengakui penyebab material, dan tidak mengakui *efficient cause* maupun *root cause*.

Contohnya teori Big Bang, Ledakan Besar yang menyebut bahwa semesta bermula 13.7 miliar tahun lalu, ketika partikel padat meledak dan mengembang, hingga membentuk gugus galaksi di seluruh antariksa. Teori yang dikenal sebagai awal semesta dan juga awal terbentuknya ruang dan waktu ini bisa menjelaskan berbagai penyebab material ledakan, tapi tidak mengakui atau tidak bisa menjelaskan *efficient cause* maupun *root cause* yang menyebabkan ledakan tersebut.

Iptek dalam Tradisi Bali

Berbagai kritik terhadap modern sains dan perkembangan teknologi yang tidak terkendali mengharuskan kita untuk merenungkan kembali tujuan dari semua kemajuan itu. Dalam lanskap manuskrip klasik Bali, ada beberapa naskah yang menarasikan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya kita jumpai dalam lontar Tantu Pengelaran.

Tantu Pangelaran menjelaskan bahwa Dewa-dewa dikirim ke Tanah Jawa untuk mengajarkan teknologi kepada manusia, yang waktu itu masih hidup secara primitif dan nomaden. Dewa Brahma diutus menjadi pandai besi, sembari mengajar manusia membuat peralatan hidup dan senjata. Hyang Wismakarma diutus menjadi undagi, sembari mengajarkan ilmu arsitektur, yaitu cara mengolah ruang dan membuat rumah. Bhatara Iswara diutus mengajarkan etika, serta sopan santun dalam bertutur dan berujar.

Bhatara Wisnu bersama Dewi Sri juga diutus mengajarkan *rājanīti*, sistem kepemimpinan dan tata Kelola masyarakat, termasuk cara memintal, berbusana dan berselendang. Sementara Bhatara Mahadewa diutus menjadi pande mas, mengajari ketrampilan membuat berbagai perhiasan. Dan Bhatara Ciptagupta atau Citrangkara diutus menjadi pelukis yang mengajarkan seni rupa, olah garis dan kombinasi warna.

Manuskrip klasik tersebut menyiratkan bahwa Dewa-dewa dalam masyarakat Bali dan Jawa Kuno merupakan simbolisasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengajarkan berbagai wawasan dan ketrampilan untuk membangun dan

mengembangkan peradaban. Brahma sebagai dewa yang pertama diutus, menyimbolkan karakter teknokrasi, di mana penciptaan perkakas penting mendorong perkembangan masyarakat secara signifikan.

Cukilan narasi di atas, sangat jelas menegaskan bahwa masyarakat Bali secara khusus, dan agama Hindu secara umum tidak anti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut inheren dalam tradisi Bali dan ajaran Hindu itu sendiri.

Selain itu, terkait filosofi ilmu pengetahuan, masyarakat Bali mengenal *Wiweka-widya* dan *Jnana-wicaksana*. Prinsip ini menekankan bahwa Sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan *widya*, tapi juga menembus kepekaan *Jnana* hingga dimensi etik dan berpuncak pada *kewicaksanaan* atau wisdom.

Untuk mencapai kawicaksanaan tersebut, ada 5 tahap yang harus dilalui yaitu: *nawang*, *bisa*, *dadi*, *patut* dan *pantes*. Seorang penuntut ilmu belum dipandang, ketika baru mencapai *nawang*. Pengetahuan itu harus dipraktikkan hingga mencapai tahap *bisa*. Setelah *bisa*, seseorang akan diuji untuk memasuki tahap *dadi*, di mana dia memiliki otoritas terhadap keadaan eksternal.

Saat mencapai *dadi* inilah, penguasaan ilmu dan teknologi seseorang diuji, apakah bisa bersikap *patut*, mampu memilah yang benar dan yang salah. Dan tahap terakhir, yaitu *pantes* di mana seorang bisa menciptakan harmoni dan kebaikan untuk sesama. Di sini lah peran jiwa seseorang, yang dituntut untuk menjadi pembimbing arah bagi sains dan teknologi yang dikuasainya

Menyambungkan Sains dan Tradisi

Satu lagi, yang menjadi kegelisahan kita semua, adalah kita cepat kagum dengan kemajuan sains dan teknologi di barat. Sikap ini dalam narasi Jawa disebut “cepet gumunan”, atau di Bali kita sering sebut “cepat ngon”.

Sikap itu harusnya tidak berhenti pada “ngon” saja, tapi dilanjutkan dengan “jengah”, sambil memeriksa lagi trajektori pengetahuan yang kita miliki, jangan-jangan kita sudah memperdebatkan sejak lama. Problem kita adalah sistem episteme kita sering terputus, dan cepat digantikan dengan sistem episteme dari luar yang sering dianggap lebih instan. Keterputusan sistem episteme dan diskursus yang menyertainya harusnya disambung lagi.

Misalnya, salah satu perdebatan besar dalam kosmologi modern, yaitu gagasan tentang ruang dan waktu. Stephen Hawking dalam buku *A Brief History of Time* menjelaskan bahwa konsep ruang dan waktu (*spacetime*) terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

Isaac Newton sebagai salah satu pendiri pilar fisika modern, menilai ruang dan waktu bersifat absolut. Pandangan tersebut dibantah Albert Einstein melalui teori relativitas, yang menyebut bahwa ruang dan waktu bersifat relatif. Seseorang yang berpindah ke medan gravitasi lain dengan kelengkungan ruang-waktu berbeda, akan mengalami percepatan atau pelambatan waktu.

Einstein juga menjelaskan bahwa waktu dipengaruhi oleh kecepatan. Jika seseorang bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat. Dengan begitu, seseorang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu maupun ke masa depan, jika mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya.

Melanjutkan teori relativitas Einstein tentang ruang-waktu, Stephen Hawking menjelaskan bahwa inflasi kosmik pasca Big Bang telah menciptakan semesta yang terus meluas dan menciptakan dunia parallel (*multiverse*). Dalam kacamata ini, alam semesta disebutkan memiliki banyak dimensi, yang mengisyaratkan adanya dunia-dunia lain di luar dunia yang kita pijak saat ini.

Teori ini masih menuai perdebatan, tapi cukup banyak kalangan kosmolog dan ilmuwan yang menggunakan konsep *multiverse* tersebut, untuk menjelaskan konsep ruang-waktu. Dan yang pasti, para ilmuwan sampai saat ini masih menjadikan konsep ruang-waktu sebagai topik sentral dalam kajian ilmu pengetahuan, karena ruang dan waktu adalah panggung bagi semua eksistensi kehidupan dan keberadaan.

Di khasanah sistem pengetahuan Hindu, termasuk di Bali, konsep ruang dan waktu juga menjadi tema penting. Kita mengenal konsep Kala, yang artinya waktu. Kita juga punya konsep **bhuta**. Kata **bhuta** yang berasal dari kata *bhu* berarti ada, menjadi, atau wujud. Kata *bhu* berkembang menjadi *bhuta* yang kemudian diartikan telah diadakan atau dijadikan, yakni unsur-unsur alam yang meliputi unsur Panca Maha **bhuta** meliputi *prathivi/tanah*, *apah/ air*, *teja/sinar*, *bayu/angin* dan *akasa/ether*.

Selaras dengan perdebatan ilmu pengetahuan modern, orang Bali juga menempatkan ruang dan waktu sebagai konsep sentral yang bisa mempengaruhi segalanya. Jika kita tidak bersahabat dengan ruang dan waktu, maka menjadi kekuatan perusak semua yang ada.

Titiang tidak akan melanjutkan eksplorasi soal Kala dan Bhuta ini, karena ini bisa menjadi tantangan dan PR bagi saintis Hindu

untuk melihatnya lebih dalam dan lebih tajam, sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan pada perdebatan sains yang sedang berlangsung.

Memuliakan Kemanusiaan

Ulasan tentang tradisi Episteme Bali, dan Sains Modern di atas tidak bermaksud menentukan salah satu yang lebih unggul. Sebaliknya, dari ulasan tersebut kita bisa melihat bahwa masing-masing ilmu memiliki kelebihan. Sains modern memiliki berbagai instrumen untuk memajukan perkembangan masyarakat, tapi juga memiliki resiko sangat buruk jika tidak diantisipasi secara bijak. Sebaliknya, tradisi pengetahuan di Bali punya berbagai kearifan yang tak dimiliki ilmu modern.

Merangkum uraian di depan, tradisi pengetahuan di Bali memiliki tiga dimensi yang bisa melengkapi Sains modern. **Pertama**, yaitu dimensi Rasa, yang bersumber pada pengakuan adanya Jiwa dalam setiap obyek di dunia. Dengan dimensi rasa ini, sains dan teknologi bukanlah alur linear antara subyek dan obyek. Sebaliknya, implementasi sains dan teknologi adalah wujud interaksi antar jiwa di alam semesta, baik jiwa-jiwa dalam diri manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda maupun jiwa alam semesta itu sendiri.

Kedua, pengetahuan tradisi Bali juga menawarkan dimensi etik, sebagai bagian integral etika masa depan, yaitu: kepatutan dan kepantasan. Dalam hal ini, implementasi sains dan teknologi bukan oposisi biner antara benar dan salah, tapi harus mempertimbangkan nilai kebaikan dan keburukan. Tak semua yang benar secara saintifik bisa diterapkan dalam masyarakat. Karena itu, implementasi kebenaran tersebut juga harus patut dan pantas. Dalam konsep Jawa harus "Bener lan

Pener," benar dan patut. Sedangkan masyarakat Bali mengenal konsep *nawang, bisa, dadi, patut* dan *pantes*. Sekali lagi, Sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan *widya*, tapi juga menembus olah kepekaan *Jnana* hingga dimensi etik dan berpuncak pada *kewicaksanaan* atau wisdom.

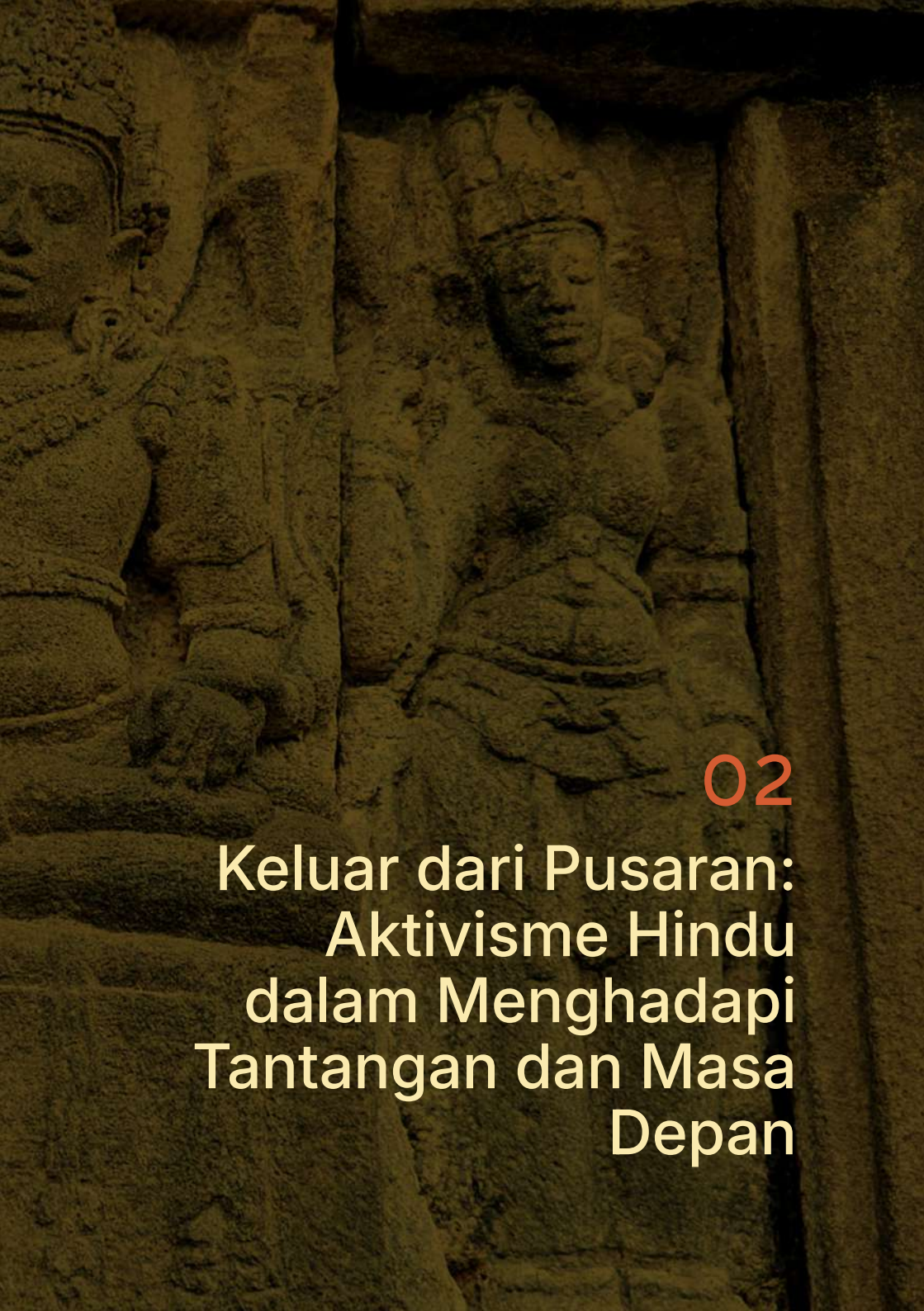
Ketiga, yaitu dimensi tujuan, di mana muara dari setiap ilmu adalah kembali pada hakikat kemanusiaan, yaitu perwujudan **jagadhita ya ca iti Dharma**, upaya menciptakan harmoni dan kebahagiaan lahir batin untuk umat manusia dan alam semesta berlandaskan atas Dharma. Tujuan ini, hanya bisa tercapai jika disinergikan dengan dua dimensi sebelumnya, yaitu dimensi rasa dan dimensi etik.

Ketiga dimensi tersebut akan membimbing sains dan teknologi pada tujuan dasarnya, yaitu memajukan peradaban dan kemanusiaan. Maka sikap terbaik yang perlu kita tempuh yaitu, membangun jembatan antara kearifan dengan kemajuan sains dan teknologi. Kita perlu membuka dialog yang sehat antara agama, tradisi dan ilmu pengetahuan. Sikap-sikap puritan yang mengorbankan ilmu pengetahuan, seperti dialami Anaxagoras dan Galileo tidak perlu terjadi lagi. Dan sebaliknya, perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi tak perlu meminggirkan kearifan agama dan tradisi.

Selebihnya, kita juga perlu berterima kasih pada perkembangan sains dan teknologi yang mampu menghubungkan dunia dalam satu komunitas global. Dengan begitu, etika modern juga mendorong kita untuk memandang berbagai kelompok di dunia sebagai satu rumpun kemanusiaan. Maka, ilmu agama, kearifan lokal, sains dan modernitas yang kita jaga secara seimbang akan melahirkan sikap welas asih yang berwawasan global.

Dan pada akhirnya, kita akan membawa semua kemajuan sains dan teknologi pada tujuan dasarnya, yaitu memajukan peradaban dan memuliakan kemanusiaan. Pada titik ini kita perlu mengingat kembali pesan salah satu ilmuwan terbesar modern, Albert Einstein yang menyebut “ilmu tanpa agama akan buta, dan agama tanpa ilmu akan lumpuh.” Sains dan agama adalah dua sisi yang harus kita jaga keseimbangannya.



The background of the entire page is a photograph of ancient Hindu stone carvings. On the left, a large, serene face of a deity is visible, partially cut off by the edge. To the right, a more complete figure is carved into the stone, wearing an elaborate, multi-tiered crown and a beaded necklace. The stone is a warm, yellowish-brown color, and the lighting highlights the textures and details of the carvings.

02

Keluar dari Pusaran:
Aktivisme Hindu
dalam Menghadapi
Tantangan dan Masa
Depan

Keluar dari Pusaran: Aktivisme Hindu dalam Menghadapi Tantangan dan Masa Depan²⁾

Hormat kami pada Maha Guru, *Sang Sampun Lepas*, I Gusti Bagus Sugriwa³⁾, yang saat ini nama beliau diabadikan sebagai nama Universitas Hindu Negeri pertama di Indonesia. Nama beliau sangat harum sebagai Rsi Agung kebudayaan Bali. Sebagai sosok multi talenta yang memberikan inspirasi bukan saja bagi para siswanya, tapi bagi semua kalangan yang mencintai seni dan budaya Bali.

²⁾ Disampaikan dalam Dies Natalis ke-1 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, tanggal 25 Mei 2021.

³⁾ Lebih jauh lihat dalam makalah Nyoman Rema berjudul: *I Gusti Bagus Sugriwa, Dalam Lintasan Sejarah Negara dan Agama Hindu*, disampaikan dalam Seminar di Denpasar, 25 Oktober 2019.

⁴⁾ Dari hasil kajian pustaka, saya menemukan dua rujukan yang sangat membantu penulisan kriya patra. Pertama, makalah Dr. Nyoman Wijaya berjudul "*Apakah Agama Hindu Bali Modern Lahir dari Tantangan Pancasila dan Islam?*" Makalah ini disampaikan pada Seminar Kemerdekaan Identity di Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Sumber rujukan kedua adalah hasil riset Michel Picard yang terbit dalam Bahasa Perancis pada 2017 berjudul "*Kebalian: La contruction dialogique de l'identite Balinaise*". Buku Picard ini sudah diterjemahkan KPG berjudul: *Kebalian, Konstruksi Dialogis Identitas Bali*, yang terbit pada 2020.

Sebagai pendidik, beliau bukan hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter dan disiplin spiritual siswa-siswanya. Beliau juga dikenal sebagai Pujangga, penjaga tradisi aksara, sastra dan bahasa Bali. Dikenal sebagai cendekiawan yang sangat produktif, telah menyelesaikan berjilid-jilid buku. Beliau juga bukan tipe intelektual yang hanya berkutat dari kelas ke kelas, tapi hadir sebagai intelektual organik dengan gelora aktivisme yang tidak pernah padam.

I Gusti Bagus Sugriwa adalah satu dari sekian banyak intelektual organik yang ikut menggerakkan kemajuan Hindu, dari masa ke masa. Intelektual organik yang tidak berdiam diri di Menara Gading, tapi menjalankan *salampah laku* sebagai Menara Air dan kadang menyediakan dirinya sebagai “penyala api”, pematik semangat dalam menyelesaikan masalah keumatan. Kaum cendikia yang tidak akan pernah puas hanya dengan *Nyastra*, tapi hadir menyampaikan pandangannya secara terbuka, masuk dalam diskursus yang mencerahkan semesta. Kita menyaksikan integritas para guru kita dalam berdebat tanpa harus saling merendahkan dan tidak saling menistakan. Mereka bersikap *ngandap kasor*, membuang kesombongan intelektualisme, dengan tetap memegang teguh *śāsana* dalam memperjuangkan pemikirannya. Pengetahuan mewujud dalam integritas diri.

Dengan mengambil inspirasi dari semangat aktivisme para Maha Guru, saya memberanikan diri menyampaikan *kriya patra* yang menjadi tema pergerakan Hindu dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi, tantangan dan masa depannya. *Kriya patra* ini penuh dengan kekurangan karena tidak dihasilkan melalui riset yang mendalam. Disusun dalam waktu yang sangat terbatas dengan sumber rujukan yang juga masih sangat langka ⁴⁾. Semoga *kriya patra* ini bisa sedikit melengkapi berbagai pemikiran yang sudah ada terkait kajian Pergerakan Hindu di Indonesia.

Benteng Perlindungan

Studi Wijaya (2010) dan Picard (2020) menyebutkan fase awal dari aktivisme Hindu bukanlah mulai pada awal kemerdekaan, tapi harus ditarik jauh ke belakang sampai ke era tahun 1920-an. Saat itu, di Bali telah lahir kumpulan kaum terpelajar yang punya kesempatan mendapatkan pendidikan Belanda, lalu aktif mendirikan perkumpulan dan menyampaikan pandangannya secara terbuka melalui media massa, baik majalah maupun surat kabar. Mendirikan perkumpulan dan menulis di media massa, menjadi cara baru dalam memperjuangkan gagasan untuk mempengaruhi masyarakat yang lebih luas.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua puluh lima tahun, perkumpulan yang didirikan kelas menengah baru itu seperti patah tumbuh, hilang berganti. Pada tahun 1917-1920 berdiri Setiti Bali oleh I Goesti Bagoes Tjakra Tanaya. Hilang Setiti Bali, terbit Soeta Gama Tirta (1920-1921). Berlanjut dengan Santi (1923), Bali Adnyana (1924-1930), Surya Kanta (1925-1927), Catur Wangsa Deriya Gama Tirta (1926), Yayasan Bali-Kirtya Liefrink-Van der Tuuk (1928) yang menerbitkan majalah *Bhawanagara* pada tahun 1931-1935, Eka Laksana (1935), Bali Darma Laksana (1936-1942) yang menerbitkan Majalah Djatajoe.

Bukan hanya kaum menengah baru saja yang mendirikan perkumpulan, tapi para pandita (Pedanda) juga ikut terlibat dalam perkumpulan. Pada tahun 1945 diselenggarakan Paruman Pandita Dharma di Klungkung yang berlanjut dengan pendirian Paruman Para Pandita yang diketuai oleh Ida Pedanda Made Kemenuh.

Dalam perkumpulan-perkumpulan ini, kaum terpelajar Bali berdebat dan memformulasi gagasan mereka, terutama terkait

mendefinisikan ulang mengenai jaman baru. Bahkan terjadi polemik di antara mereka terkait banyak hal, mulai soal agama dan adat, kaitan antara agama Bali dengan agama Hindu dan juga India, penamaan agama Bali sampai dengan sikap terhadap politik kebudayaan kolonial atas Bali yang dikenal dengan nama *Baliseering*. Salah satu polemik kebudayaan yang sangat terkenal adalah antara Bali Anyana dengan Surya Kanta. Di masa berikutnya polemik diwadahi dalam mimbar majalah *Bhawanagara* dan *Djatajoe*.⁵⁾

Di balik semua perbedaan pandangan di antara mereka, Picard (2020) menyampaikan bahwa para intelektual Bali memiliki kesamaan dalam beberapa pemikiran: pertama, para intelektual Bali merasa perlu mempertahankan Bali dari ancaman penyebaran Agama Islam dan Kristen. Kedua, mereka memandang Bali sebagai entitas tunggal yang memiliki adat dan kebiasaan sendiri.

Para intelektual Bali sangat terganggu dengan pandangan yang muncul dari berbagai kalangan eksternal (sebagian birokrat-administrator kolonial dan kalangan misionaris) yang terkesan "merendahkan" Agama Bali. Pandangan eksternal itu terbentuk dari paham agama Abrahamik dalam mendefinisikan agama. Sehingga, agama-agama di luar Abrahamik sering dilihat sebagai Paganisme atau Animisme- Dinamisme yang tidak beragama.

⁵⁾ Banyak studi yang telah membahas polemik kebudayaan Bali Adnyana dengan Surya Kanta. Saya juga pernah menulis sebagai skripsi di UGM yang selanjutnya diterbitkan tahun 2001. Lebih jauh lihat Dwipayana AAGN, *Kelas dan Kasta, Pergulatan Kelas Menengah Bali*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001. Polemik di setiap masa juga dipaparkan dengan sangat baik oleh Michel Picard (2020)..

Kategori beragama dengan tidak beragama ini dibangun secara hierarkis menjadi beradab di atas tidak beradab atau masyarakat modern yang diletakkan di atas masyarakat yang kolot/ tradisional. Pandangan eksternal inilah yang selanjutnya menggelisahkan banyak kaum terpelajar Bali.

Tidak semua kalangan eksternal (kolonial) memandang Agama Bali seperti itu. Pandangan berbeda disampaikan oleh Residen Bali dan Lombok, H.T. Damste dan ilmuwan orientalis Belanda seperti Victor Emanuel Korn, Roelof Goris dan lain-lain. H. T Damste menolak pandangan yang berkembang di kalangan administrator Belanda dan juga para misionaris, yang menginginkan terbentuknya blok Kristen di wilayah Indonesia Timur untuk melawan ekspansi Islam. Damste juga menganggap Agama Bali harus dilestarikan dengan proteksi yang ketat. Untuk itu, semua kegiatan misionaris di Bali harus dilarang (Picard, 2020; Robinson, 1995).

Pandangan untuk mempertahankan Agama Bali juga disuarakan oleh kaum cendikia orientalis Belanda, Mereka bagian dari politik kebijakan kolonial untuk *renaissans* kebudayaan Bali yang dikenal dengan nama *Baliseering*.⁶⁾ Pada 1928, Gubernur Hindia Belanda de Graeff meresmikan sebuah Yayasan yang ditujukan bagi pengumpulan dan penelitian manuskrip Bali yang dikenal dengan Gedung Kirtya. Residen Bali dan Lombok saat itu, Caron, menginginkan Kirtya menjadi pusat pengetahuan tentang peradaban tanah Bali dan Lombok.

⁶⁾ Pengaruh politik kebudayaan kolonial terhadap konstruksi identitas Ke-Balihan menjadi tesis utama dalam studi Michel Picard (2020). Saya juga pernah menulis hal ini dalam buku: Dwipayana, AAGN, *GloBALism: Pegulatan Politik Representasi atas Bali*, Uluangek, Denpasar, 2005.

Untuk mendukung misi itu, tahun 1930 diterbitkan majalah berkala Bhawanagara. Bhawanagara yang terbit selama empat tahun, banyak dimanfaatkan oleh para intelektual Bali untuk menuliskan pandangannya. Namun, ada yang menarik dalam majalah itu, di mana Goris dan para orientalis Belanda lainnya, membantu menegaskan pertautan agama Bali dengan India. Minat terhadap India jelas nampak dalam sejumlah artikel tentang kitab Weda, Upanisad dan Bhagawadgita. Hal ini mendorong dimulainya apa yang disebut sebagai Hinduisasi agama Bali (Howe 2001, Picard:2020).

Upaya untuk memproteksi ketat Bali dari ancaman Misionaris tidak sepenuhnya berhasil (Picard, 2020). Kelompok-kelompok misi penginjilan tetap berlangsung. Rangkaian pembaptisan awal orang Bali menimbulkan kontroversi keras termasuk dari kalangan orang Belanda sendiri. Jejaknya bisa dilihat dalam polemik antara Bosch, Direktorat Arkeologi Batavia dan Roelof Goris dengan para pendukung gigih misi penginjilan ke Bali yang bernama Kraemer.

Penamaan Agama Bali

Ancaman proses penginjilan ke Bali membuat para intelektual Bali memiliki tantangan baru yang mendesak, yakni: mereformulasi identitas Agama Bali. Sebelumnya, Agama Bali tidak disebutkan dalam nama atau identitas yang tunggal. Ada yang menyebutkan sebagai Agama Siwa-Budha, Agama *Tirtha*, Agama *Tri Murti*, Agama Hindu-Bali atau bahkan Agama Bali-Hindu.

Keragaman penamaan Agama Bali muncul karena orang Bali menjalankan agama secara otopraksis, melanjutkan tradisi kuno yang mengalir tanpa putus dari masa Raja Kesari Warmadewa, Mataram Kuno, Medang Kemulan, Kediri, Singhasari sampai dengan Wilwatikta Majapahit. Semua tradisi itu berasal dari

akar Hinduisme di tanah Bharatawarsha. Tradisi Hindu dari India tersebut yang selanjutnya mengalami pelokalan (*localization*), bercampur dengan tradisi-tradisi lokal yang tumbuh dalam masyarakat Jawa maupun Bali.

Proyek besar pelokalan tradisi Hindu-India pertama kali dilakukan di masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama, yang dikenal dengan *Mangjawaken Byasamata*. Proyek pelokalan sastra dan aksara Hindu-India itu melahirkan banyak mahakarya gubahan dari para pujangga Jawa, di masa Kediri. Seperti: kakawin *Bharatayudha*, *Hariwangsa*, *Gatotkacasraya*, *Semarandahana*, dan *Sumanasantaka*.

Di masa Majapahit, proyek pelokalan kitab-kitab Hindu berlanjut dengan munculnya mahakarya: Kakawin *Arjuna Wijaya*, *Sutasoma*, *Wrettasancaya*, *Siwaratrikalpa*, *Patibrata* sampai dengan *Banawa Sekar*. Setelah kekuasaan Majapahit berakhir, tradisi pelokalan agama Hindu ini mendapatkan ruang hidup di dalam benteng Pulau Bali⁷⁾ sehingga bisa berlanjut dari masa ke masa. Bahkan tradisi Hindu-India yang sudah dilokalkan di masa Kediri sampai Majapahit mengalami pelokalan ulang di Bali, terutama di masa Gelgel (1350-1710).

Proses pelokalan tradisi Hindu-India ini membuat Agama Bali memiliki kekhasan. Di mana agama dan adat menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Lebih-lebih di masa pemerintahan Asta Nagara (delapan kerajaan Pra Kolonial dan dilanjut pada saat Negara *Bestuurder* dan *Zelfbestuurders*), praktek agama Bali menjadi beragam sesuai dengan hukum adat, *paswara* dan juga *desa mawa cara*.

Percampuran antara agama dan adat inilah yang memunculkan perdebatan antara Surya Kanta dan Bali Adnyana. Surya Kanta

ingin meneguhkan agama tapi mengambil sikap kritis terhadap adat yang usang dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Sedangkan Bali Adnyana kukuh berdiri pada peneguhan agama dan juga adat. Pandangan reformis terhadap agama dan adat yang diusung oleh Surya Kanta membuat mereka mencari rujukan pada sumber-sumber manuskrip Hindu di India dan cenderung mengusung nama Agama Bali-Hindu sebagai identitas Agama Bali. Sebaliknya Bali Adnyana lebih mengacu pada manuskrip yang diwarisi dari tradisi Majapahit dan mengajukan penamaan Agama Hindu-Bali.

Walaupun berbeda pandangan, keduanya terlihat menempatkan Hindu sebagai dasar yang paling pokok dari Agama Bali. Di luar penamaan yang diajukan oleh perkumpulan Surya Kanta dan Bali Adnyana, juga muncul usulan lain terhadap penamaan Agama Bali, seperti: Agama Tirta yang muncul dalam Paruman

⁷¹ Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500, penganut Hindu mendapat benteng perlindungan yang kokoh yakni: Pulau Bali, yang terpisah oleh selat dengan pulau-pulau di sekelilingnya. Tapi, walaupun berada dalam benteng bukan berarti Bali sepenuhnya terisolir. Silang budaya tetap terjadi di bawah naungan dan kendali struktur kekuasaan politik yang mengontrol teritori pulau. Artinya, Bali bukan hanya memiliki benteng alam tapi juga benteng politik. Struktur kekuasaan politik yang memegang kendali Bali ini menjadi semacam penjaga benteng dari ancaman eksternal, terutama Jawa, yang ingin masuk ke Bali. Setelah kejatuhan Majapahit, Islamisasi mengarah ke timur. Tapi proses Islamisasi berhenti sampai di semenanjung Blambangan karena terhalang selat Bali. Di timur, sudah berdiri kerajaan Gelgel (Swecapura) yang berdaulat atas pulau Bali. Inilah penghalang utama proses Islamisasi ke arah timur. Berbagai upaya dilakukan untuk menaklukkan benteng. Salah satu kisah yang sering diangkat adalah kedatangan utusan kerajaan Mataram Islam dari Jawa yang menemui Raja Dalem Waturenggong di Gelgel. Tapi, upaya utusan untuk mengislamkan Bali gagal. Yang terjadi justru sebaliknya, beberapa kali kerajaan di Bali mencoba menaklukkan Jawa, dengan melakukan ekspedisi militer ke bagian timur Pulau Jawa. Setelah kerajaan Gelgel, perluasan politik ke Jawa pernah dilakukan kerajaan Mengwi.

Pandita Darma dan dilanjutkan oleh Paruman Para Pandita. Sebelumnya penamaan *Gama Tirta* pernah dipakai sebagai nama perkumpulan yang didirikan oleh Ketut Nasa pada tahun 1920. Demikian, nama Hindu-Bali juga pernah digunakan sebagai identitas nama perkumpulan Catur Wangsa Deriya Gama Hindu Bali pada tahun 1926.

Selain masalah penamaan Agama Bali, para intelektual Bali saat itu kesulitan dalam menjawab pertanyaan khas agama Abrahamik terkait kitab suci Agama Bali, apa yang menjadi rujukan pokok dari Agama Bali. Sehingga, mulai tahun 1937, dalam majalah Djatajoe muncul seruan agar Bali menyetujui prinsip-prinsip umum yang mendasari keragaman ritual di berbagai Negara Bestuurder yang memang berbeda-beda. Pada pertemuan perkumpulan Bali Darma Laksana pada tahun 1937, I Gusti Gde Raka mengajukan permintaan resmi kepada Ketua Paruman Kerta Negara untuk mendirikan komisi untuk menyusun kitab suci. Pada tanggal 8 April 1940, A.A.A. Anglurah Ketut Karangasem sebagai Ketua Paruman Kerta Negara mengirimkan surat yang menyatakan bahwa upaya menulis sebuah kitab suci telah gagal, alasan yang diberikan adalah agama tidak dipisahkan dari adat, dan adat berbeda dari satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, berbeda dari satu desa dengan desa yang lain. Itu artinya, upaya Bali Darma Laksana untuk mendorong penyusunan kanon teologi Agama Bali yang berlaku untuk seluruh Bali tidak membuahkan hasil.

Satu hal yang tidak memunculkan perdebatan panjang adalah penyebutan Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk mengganti kata Tuhan yang Esa. Seperti diketahui istilah Tuhan yang Maha Esa dikenal dalam paham Monoteisme yang dianut oleh agama-agama Abrahamik. Penyebutan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sudah jamak muncul dalam tulisan para intelektual Bali di majalah-majalah yang terbit saat itu, mulai dari Surya Kanta, Bali

Adnyana, Bhawanagara sampai dengan Djatajoe. Para intelektual Bali juga terlibat dalam diskursus, dan selanjutnya membangun konsep ke-Esa-an Tuhan dalam Agama Bali. Waktu itu Agama Bali sering mendapat serangan dari pihak eksternal, dianggap sebagai pemuja berhala dan penganut paham politheisme.

Memperjuangkan Pengakuan Negara

Pascakolonial, isu utama yang dihadapi penganut Agama Bali adalah masalah pengakuan dari Negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Seperti diketahui bersama, sebelum Indonesia merdeka, terjadi perdebatan para pendiri bangsa di PPKI mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Sebagian menghendaki mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, akhirnya terjadi konsensus kebangsaan, dengan menghilangkan kalimat syariat Islam dalam rumusan dasar negara di Pembukaan UUD. Dan juga dicapai kesepakatan untuk mencantumkan dalam Konstitusi bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya konsensus kebangsaan saat itu, bukan berarti semua urusan terkait relasi antara Negara dengan agama-agama yang ada di Indonesia, sepenuhnya selesai. Masih terjadi pergulatan politik-ideologis di antara elit politik (1945-1959). Beberapa kelompok politik ingin tetap memperjuangkan gagasan Negara Islam, baik melalui jalur politik-parlementaris maupun ada kelompok yang mencoba melakukan pemberontakan bersenjata (DI/TII).

Walaupun pandangan dominan menolak paham Negara Agama, Negara Republik Indonesia yang baru berdiri juga

tidak mengambil posisi sebagai negara sekuler. Negara tetap mengurus kepentingan dan memberi layanan pada umat dari agama-agama yang diakui negara. Pelayanan negara ini dilakukan dengan membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada awalnya, Januari 1946, Kementerian Agama dibentuk untuk melayani kepentingan umat Islam saja. Selanjutnya Kementerian Agama diperluas pada November 1946 untuk melayani Agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik.

Negara juga membuat batas antara urusan agama yang ditangani Kementerian Agama dengan urusan Aliran Kepercayaan/Kebatinan yang dianggap sebagai kebudayaan dan dilayani oleh kementerian terpisah. Hal inilah yang membuat Negara terlibat dalam pendefinisian agama dan menentukan kriteria agama resmi yang diakui negara. Pada tahun 1952, Kementerian Agama menetapkan syarat-syarat agar suatu agama diakui oleh Negara melalui Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952. Syarat-syarat yang dibuat oleh Kementerian Agama antara lain: mengakui suatu teologi yang sangat monoteistis sesuai dengan doktrin Keesaan Tuhan (*tauhid*), telah diungkap oleh seorang Nabi yang sabdanya dicatat dalam sebuah kitab suci, memiliki jemaat yang terorganisasi, diakui secara internasional dan tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu. Dengan rumusan kriteria seperti itu, maka agama yang bisa diakui oleh Negara sangat bersifat eksklusif, khas paham agama-agama Abrahamik dan menekankan pada *scriptural* (agama kitab) serta bersifat universalis.

Dengan definisi agama seperti itu maka, agama-agama Abrahamik: Agama Islam dan Agama Kristen (Katolik dan Protestan) jelas tidak mengalami masalah. Selain itu, keduanya, secara demografis memiliki pemeluk yang besar, dan tersebar di berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air. Berbeda halnya

dengan kondisi yang dialami agama- agama non Abrahamik, dan dengan jumlah pemeluk yang minoritas, seperti: Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan sebagainya.

Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama RI di setiap provinsi, pada tahun 1951, mulai dibuka di Singaraja, Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil (KUAP). Dilanjutkan dengan pendirian Kantor Urusan Agama Daerah Bali (KUAD) di Denpasar. Kedua kantor itu hanya mengatur dan melayani kepentingan umat Islam saja. Sedangkan, setelah penghapusan Dewan Raja-raja dan Paruman Agung pada September 1950, Agama Bali kehilangan payung perlindungan. Tidak jelas institusi pemerintahan yang akan mengurus dan melayani Agama Bali.

Hal ini memunculkan tuntutan dari Dewan Pemerintah Daerah Bali agar Kementerian Agama mengakui secara resmi Agama Bali seperti halnya Agama Islam dan Kristen. Merespon tuntutan itu, Kementerian Agama mengirim delegasi yang dipimpin Menteri Agama pada tanggal 26 Desember 1950. Dalam kunjungannya ke Bali, Menteri Agama menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah lama membebani intelektual Bali: apa nama agama yang dianut oleh orang Bali, nama Tuhannya, Siapa Nabinya dan apa kitab sucinya, apa fungsi ritus-ritusnya serta teologis kredonya. Tapi, kunjungan Menteri Agama ke Bali tersebut tidak memberikan dampak apapun pada pengakuan Agama Bali. Dua tahun kemudian justru lahir Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 yang mengatur syarat-syarat suatu agama diakui Negara. Sama persis dengan pertanyaan dari Menteri Agama saat berkunjung ke Bali.

Untuk mendukung tuntutan Dewan Pemerintah Daerah Bali, pada tanggal 10 Juni 1951, pimpinan empat perkumpulan, yang terdiri dari: Paruman Para Pandita, Majelis Hinduisme, Panti

Agama Hindu-Bali dan Wiwada Sastra Sabha⁸⁾ mengadakan pertemuan dan membuat petisi tertulis untuk disampaikan kepada Kementerian Agama. Petisi itu memuat empat tuntutan, yaitu; penempatan wakil-wakil agama dalam kantor-kantor agama; Pembentukan panitia penyusunan kitab ajaran agama Hindu Bali; Tunjangan biaya hidup untuk para pedanda dan pemangku; dan sumbangan dana antara lain untuk keperluan upacara keagamaan, pemeliharaan pura- pura utama, dan memajukan kesenian.

Pada tanggal 23 Agustus 1951, Kementerian Agama menolak semua tuntutan itu dan bersikeras untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan persyaratan yang telah mereka rumuskan. Merespon penolakan itu, dibentuk sebuah komite di Singaraja untuk memenuhi persyaratan Kementerian Agama. Komite menyelenggarakan beberapa kali pertemuan sepanjang tahun 1951-1952. Pada Mei 1952, kembali dilakukan pertemuan diantara empat perkumpulan di Tampaksiring dan berhasil menyepakati nama yang akan diusulkan ke Kementerian Agama adalah Agama Hindu-Bali.

Walupun sudah mendapatkan petisi dari Bali, Kementerian Agama tetap bergeming. Bahkan pada tanggal 10 Oktober 1952, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berkunjung

⁸⁾ Dalam kurun waktu 1945-1950-an, intelektual Bali kembali mendirikan lagi perkumpulan, diantaranya: Pertama, Paruman Para Pandita yang berdiri pada 9 Januari 1949. Pada tanggal 31 Desember 1950, berdiri Majelis Hinduisme. Pada awal 1951 muncul organisasi Wiwadha Shastra Sabha yang bertujuan mempelajari naskah-naskah agama; Pada pertengahan tahun 1951 muncul organisasi Panti Agama Hindu Bali di Singaraja, untuk memperdalam filsafat agama Hindu Bali, menyederhanakan upacara agama Hindu Bali, dan mengubah adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

ke Denpasar dan menegaskan bahwa agama Hindu Bali tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan resmi dari Negara.

Penolakan Kementerian Agama ini memunculkan reaksi keras dari Dewan Pemerintah Daerah Bali. Dewan Pemerintah Daerah mengusulkan kepada DPRDS untuk membentuk Jawatan Agama Otonom Daerah Bali, sebagai tandingan Kantor Urusan Agama Daerah (Kabupaten) yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil.

Merespon manuver itu, Kementerian Agama melalui Sekjen melakukan negosiasi dengan Gubernur Provinsi Sunda Kecil, Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua DPRDS pada Februari 1953 dengan hasil yang tidak memuaskan: agama Hindu Bali tetap digolongkan oleh Kementerian Agama dalam rubrik H, seperti aliran/ Gerakan agama lainnya yang tidak diakui sebagai agama menurut hakekatnya. Ini artinya, penolakan masih tetap terjadi.

Kementerian Agama hanya memberikan sedikit konsesi, dengan menempatkan bagian Hindu-Bali di Kantor Urusan Agama Provinsi Sunda Kecil. Konsesi itu jelas bukan sebuah pengakuan resmi dari Kementerian Agama atas Agama Hindu Bali.

Setelah kegagalan negosiasi tersebut, akhirnya pada tanggal 1 November 1954, Dewan Pemerintah Daerah Bali atas persetujuan DPRDS memilih berjalan sendiri, dengan cara meresmikan Dinas Agama Otonom Daerah Bali di Singaraja. Dinas Agama tersebut khusus didirikan untuk melayani Agama Bali. Dan Dinas tersebut memiliki cabang di setiap Kabupaten di pulau Bali. Dewan Perwakilan Daerah Bali juga memutuskan hubungan dengan KUAP dan KUAD yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama.

Berbagai hambatan yang dihadapi penganut Hindu Bali dalam memperjuangkan pengakuan Negara memunculkan dua reaksi; reaksi pertama adalah sikap apatis yang terungkap dari pernyataan "Agama adalah soal kepercayaan bukan soal pengakuan". Kelompok ini tidak berminat lagi memperjuangkan pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan menyerukan agar orang Bali fokus menjalankan keyakinannya selama ini, Agama Hindu-Bali.

Reaksi kedua adalah radikalisasi gerakan, baik secara intelektual maupun politik. Secara intelektual dilakukan dengan upaya pencarian dasar-dasar Agama Hindu Bali, yang diyakini tidak berbeda dengan agama Hindu di India. Sedangkan secara politik, radikalisasi gerakan muncul melalui pendirian Dinas Agama Otonom Daerah Bali, Gerakan Kumara Bhavana menuntut wakil Hindu-Bali di Dewan Nasional (1957), seruan Gerakan Aksi Bersama menuntut bagian Hindu-Bali di Kementerian Agama (1958) sampai dengan pertemuan delapan organisasi yang tergabung dalam Kerjasama Organisasi Agama Hindu-Bali tentang Kedudukan Agama Hindu Bali dalam Organisasi Kementerian Agama.

Proses radikalisasi gerakan agama Hindu Bali terjadi di tengah momentum pergulatan politik-ideologis yang sengit di tingkat nasional. Konstituante beberapa kali gagal untuk menyepakati dasar negara. Polarisasi politik mengental antara kubu pengusung gagasan Negara Islam versus kubu pendukung Negara Nasional (Pancasila). Presiden Sukarno, yang saat itu hanya memiliki kekuasaan simbolik sebagai Kepala Negara, beberapa kali menyampaikan pandangannya secara terbuka. Sukarno mengecam beberapa Partai Islam yang memaksakan negara berasaskan Islam dan memperingatkan terancamnya persatuan nasional.

Dalam konteks politik seperti itu, pada tanggal 29 Juni 1958, sebuah delegasi yang mewakili lima perkumpulan Agama Hindu-Bali menemui Presiden Sukarno di Istana Tampaksiring untuk menyampaikan resolusi. Delegasi itu terdiri dari Ida Pedanda Made Kemenuh (Paruman Para Pandita), I Gusti Anandakusuma (Satya Hindu Dharma), Ida Bagus Wayan Gede (Yayasan Dwijendra), Ida Bagus Gde Dosther (Angkatan Muda Hindu-Bali), dan I Ketut Kandia (Panti Agama Hindu Bali). Beberapa sumber menyebutkan Presiden Sukarno didampingi I Gusti Putu Merta (Ketua DPRD), A.A. Bagus Suteja dan I Gusti Bagus Sugriwa dari Dewan Pemerintah Daerah Bali.

Dalam pertemuan di Istana Tampaksiring, delegasi menyampaikan tuntutan, agar Presiden Sukarno memperhatikan permohonan seluruh umat Hindu Bali, agar Agama Hindu-Bali diberikan kedudukan sebagai bagian di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pertemuan antardelegasi Hindu-Bali dengan Presiden Sukarno membuahkan hasil. Selang beberapa bulan setelah pertemuan, pada tanggal 5 September 1958, Menteri Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.2 tahun 1958, memutuskan untuk membentuk Bagian Hindu Bali di Kementerian Agama RI. Dan diteruskan dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 40 tahun 1960 yang secara resmi membentuk Bagian Urusan Hindu Bali di Kementerian Agama. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1963 didirikan Kantor Agama Daerah Tingkat I Bali, dan tahun 1963 dilakukan perubahan dari Bagian Urusan Hindu Bali menjadi Biro Urusan Agama Hindu Bali. Setelah Orde Baru berkuasa, Biro urusan Agama Hindu Bali berubah menjadi Direktorat Jenderal Hindu Bali dan Budha di Departemen Agama RI.

Pembentukan bagian/ Ditjen di Kementerian/ Departemen Agama Republik Indonesia menandai tahap penting dari perjuangan mendapatkan pengakuan resmi dari Negara pada agama Hindu-Bali. Perjuangan yang membutuhkan waktu kurang lebih tiga belas tahun. Tapi, setelah mendapatkan pengakuan resmi dari Negara, tantangan baru telah menunggu.

Pergulatan Perumusan Hindu Nasional

Pengakuan resmi Negara bukan akhir dari pergulatan di antara intelektual Bali. Wijaya (2010) menyebutkan proses ini sebagai proses pemaskaraan dan peniruan (replikasi identitas) Agama Hindu-Bali agar sesuai dengan agama-agama Abrahamik yang cenderung *scriptural* dan universalis. Picard dan Howe menyebutkan proses ini sebagai Hinduisasi agama Bali.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, percampuran antara agama dengan adat membuat Agama Hindu-Bali menjadi sangat khas dan praktiknya beragam menurut *Desa Mawa Cara*. Hal ini juga membuat Agama Hindu-Bali mudah diserang sebagai agama etnik yang hanya dianut oleh suku Bali dan tidak bersifat universal.

Persoalan ini pernah diangkat oleh Perkumpulan Bali Darma Laksana yang mendorong Paruman Kerta Negara untuk menyusun Kanon Agama Hindu-Bali. Tapi upaya menyusun Kanon teologis Agama Hindu-Bali itu pada tahun 1940 dinyatakan gagal. Dalam perkembangan selanjutnya tantangan ini muncul lagi setelah Agama Hindu-Bali mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Dalam merespon tantangan ini, beberapa intelektual Bali termasuk kalangan orientalis Belanda seperti Roelof Goris,

mencari pada pertautan antara agama Hindu Bali dengan India. Melalui tulisannya di majalah Bhawanagara (1931), Roelof Goris mendorong kaum terpelajar Bali untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang bahasa Sansekerta, sehingga bisa menemukan sumber-sumber utama Wedha, Upanisad dan Bhagawadgita. Goris menerbitkan kajian panjang tentang bahasa Sansekerta yang dimuat bersambung dengan disertai kosakata Sansekerta-Bali.

Upaya menyambung pertautan komunikasi Hindu-Bali dengan India juga muncul dalam pandangan di Majalah Djatajoe yang menyarankan untuk mendatangkan seorang Guru dari India untuk mengajarkan dasar-dasar Agama Hindu kepada orang Bali. Selain itu, ada juga yang mendukung pengiriman siswa Bali untuk belajar ke India.

Pada tahun 1950, *India Council fo Cultural Relations* memberikan beasiswa kepada siswa Indonesia untuk belajar di Universitas di India. Salah satu penerima beasiswa adalah Ida Bagus Mantra yang mendapatkan kesempatan belajar di Vishva Bharati di Shantiniketan, Benggala. Ida Bagus Mantra menyelesaikan tesis Doktoralnya yang berjudul *Hindu Literature and Religion in Indonesia*, pada tahun 1955. Ketika sedang menyelesaikan studi di India, Ida Bagus Mantra pernah memuat surat terbuka dengan judul "*Soal Agama di Bali*" yang dimuat di harian Suara Indonesia yang terbit di Bali. Picard (2020) menyebutkan surat terbuka Ida Bagus Mantra berpengaruh dan berdampak besar di kalangan intelektual Bali. Meyakinkan mereka untuk beralih ke India untuk memperoleh solusi bagi persoalan Agama Hindu-Bali.

Mengikuti jejak Mantra, Ida Bagus Oka Punyatmadja menerima beasiswa untuk belajar di Universitas Hindu Banaras pada 1953. Disusul oleh Tjokorda Rai Sudharta yang juga mendapatkan

rekomendasi untuk belajar di India dari Profesor Raghu Vira dari *International Academy of Indian Culture*. Sebelumnya Prof. Raghu Vira pernah datang ke Bali untuk melakukan penelitian tentang sejarah budaya Bali di Gedung Kirtya.

Selain terjadi proses interaksi intelektual Bali dengan Prof. Raghu Vira, sebelumnya pada tahun 1949, datang ke Bali Narendra Dev. Pandit Shastri. Pandit Shastri menulis sebuah tulisan berjudul "*Dasa Sila Agama Bali*" yang menegaskan bahwa agama Hindu-Bali tidak berbeda dengan Hinduisme yang dipraktikkan di India. Shastri menutup tulisannya dengan mantram *Tri Sandhya*, yang selanjutnya dipopulerkan secara nasional. Picard juga menulis bahwa Shastri berkontribusi besar dalam merumuskan kerangka teologis: *Panca Sraddha*, yang pada tahun 1964 menjadi kanon resmi agama Hindu.

Dengan basis intelektualitas yang semakin beragam, kaum terpelajar Bali berhasil mencapai titik penting dalam perumusan dasar-dasar kanon teologis agama Hindu. Proyek perumusan dasar-dasar agama Hindu-Bali sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1920-an, kemudian berlanjut pada pasca kemerdekaan setelah Kementerian Agama RI menetapkan syarat agama resmi yang diakui negara, yang bias agama Abrahamik. Tantangan ini membuat para intelektual Bali berupaya mereformulasi dasar-dasar agama Hindu menjadi lebih berbasis skriptual dan bersifat universal.

Tantangan berikutnya adalah ketika agama Hindu-Bali harus merespon gelombang masuknya etnik non-Bali yang menyatakan diri sebagai pemeluk agama Hindu. Gelombang ini terjadi ketika Negara menerapkan PNPS 1/1965, Negara yang hanya mengakui 5 agama resmi. Politik Agama resmi yang diatur dalam PNPS No. 1 tahun 1965 yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 5

Tahun 1969. Sejalan dengan itu Menteri Agama mengeluarkan instruksi No. 4 Tahun 1978 dan No. 14 Tahun 1978. Dalam kedua surat instruksi tersebut ditegaskan–mengutip Tap MPR No. IV/ MPR/1978 tentang GBHN bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama. Oleh karena itu, Departemen Agama tidak akan mengurus persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama tersebut.

Aturan ini membuat para penganut kepercayaan lokal/kebatinan diwajibkan memilih lima agama resmi yang sudah diakui Negara. Jika mereka tidak memilih salah satu dari agama yang diakui, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan administrasi kewarganegaraan dan juga dalam mendapatkan bantuan dari negara. Akibatnya, beberapa kelompok penganut kepercayaan lokal menyatakan diri sebagai pemeluk Hindu.⁹⁾

⁹⁾ Beberapa kepercayaan lokal sebagian pemeluknya menyatakan diri sebagai Hindu mulai dari Parmalim atau “Malim” di Tanah Batak. Selain itu ada penganut Pamena di daerah karo. Pasca 1965, penganut Pamena harus memilih salah satu agama resmi Pemerintah, hal ini mengakibatkan, penganut Pamena terpecah, ada yang ke Islam, Kristen, dan Hindu. Di Jawa, aliran kepercayaan lokal mulai dari Tanah Sunda, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Tengger, beberapa penganutnya menyatakan sebagai penganut Hindu. Begitu juga di Pulau Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Di Kabupaten Tana Toraja. Penganut Alukta atau Aluk Todolo (Agama Leluhur) yang diyakini masyarakat Toraja dari “Puang Matua” menyatakan diri sebagai Hindu. Di Pulau Kalimantan, beberapa kelompok suku Dayak menyatakan diri sebagai penganut Hindu. Di Kepulauan Kei, Maluku, beberapa komunitas lokal juga menyatakan diri sebagai Hindu. Varian Hindu juga muncul di kantong-kantong etnik keturunan India mulai dari Sumatera Utara sampai Jakarta. Tradisi Hindu yang berkembang di komunitas India juga beragam.

Dengan latar belakang tantangan seperti itu, para intelektual HinduBali harus memberikan respon dengan cara merumuskan sebuah kanon teologis Agama Hindu. Kanon itu diharapkan bisa menjadi dasar dan pegangan dalam memberikan penjelasan ke pihak eksternal maupun menjadi basis internalisasi ke dalam. Dengan rumusan kanon agama itu, agama Hindu-Bali terlepas dari tuduhan sebagai agama etnik, karena prinsip-prinsip dasarnya sangat universal.

Saya mencatat ada beberapa rumusan kanon teologis yang sangat penting dalam perkembangan Hindu ke depan: **Pertama**, *Panca Sraddha*, lima dasar keyakinan Agama Hindu. Walaupun baru muncul pada tahun 1964, *Panca Sraddha* menjadi kerangka teologis yang bisa diterima secara universal sebagai ciri dari agama Hindu. **Kedua**, rumusan tentang ke-Esaan Tuhan dalam agama Hindu yang diambil dari Chandogya Upanishad: *Tat Sat Ekam Eva Adwityam Brahman* dengan *Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti* yang dirujuk dari Reg Weda. Sehingga bisa memperjelas konsepsi ke-esa-an Tuhan/Brahman yang disebut dengan banyak nama. Dan Dewa-dewa sebagai sinar suci Brahman.

Ketiga, tiga kerangka dasar agama Hindu: *tatwa*, *susila* dan *upacara*. Dengan metafora tiga lapisan maka lapisan yang paling dalam (inti) adalah *tatwa*, diikuti lapis kedua: *Susila*. Dan lapis terluar adalah upacara yang implementasinya bisa beragam dan berubah. **Keempat**, mantram *Tri Sandhya*, yang diambil dari berbagai ragam *matram* pada tahun 1951, dan selanjutnya dipopulerkan kepada seluruh penganut Hindu, dan diwajibkan untuk disampaikan tiga kali sehari.

Wijaya (2010) menyebut perumusan kanon teologis agama Hindu ini sebagai pemaskaraan dan replikasi agama lain karena

meniru apa yang dimiliki oleh agama Abrahamik terutama Islam. *Panca Sraddha* mirip dengan Lima Rukun Islam. Ke-esaan Tuhan dalam Hindu menjawab soal *Tauhid*. Puja *Tri Sandhya* bisa jadi mengikuti kewajiban sembahyang lima waktu dalam Islam. Walaupun terkesan seperti replikasi, tapi harus diakui bahwa kanon-kanon itu bisa membuat agama Hindu Bali menjadi lebih universal dan bisa diterima oleh para penganut non etnik-Bali.

Perumusan sifat universal dari agama Hindu-Bali membuat agama Hindu-Bali berubah penamaan menjadi agama Hindu, dan bahkan selanjutnya ditekankan lagi menjadi Agama Hindu Dharma. Perubahan penamaan menjadi agama Hindu dan agama Hindu Dharma tapaknya bisa dilihat pada proses perubahan nama Majelis Agama Hindu, dari Parisada Darma Hindu Bali menjadi Parisada Hindu Dharma pada Oktober 1964. Setelah itu nama Hindu Dharma sering digunakan untuk menggantikan identitas agama Hindu Bali.

Setelah memiliki cabang di semua provinsi di Indonesia, pada Mahasabha ke-5 Parisada Hindu Dharma berubah nama lagi menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Begitu juga halnya dengan penamaan Bagian/ Biro/ Direktorat Jenderal di Kementerian Agama RI. Awalnya memakai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu-Bali dan Budha selanjutnya tahun 1969 berubah menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.

Invensi Kelembagaan

Selain berhasil merumuskan kanon Agama Hindu yang lebih bersifat universal, para intelektual juga berperan dalam pembentukan Majelis Agama Hindu, yang menjadi cikal bakal Parisada saat ini. Proses awalnya dimulai pada tanggal 7 Oktober

1958 ketika Gubernur Bali, membentuk Panitia Perancang Hindu Bali Sabha. Panitia dipimpin oleh Ida Bagus Mantra, Doktor baru lulusan dari Shantiniketan India dan beranggotakan Putu Serangan (Dinas Agama Otonom), Ida Pedanda Made Kemenuh (Paruman Para Pandita), Ketut Kandia (Panti Agama Hindu Bali), dan Wedastera Suyasa (Angkatan Muda Hindu Bali).

Setahun setelah itu (21-23 Mei 1959), Panitia berhasil menyelenggarakan Hindu-Bali Sabha di Fakultas Sastra Universita Udayana, yang melahirkan Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB). Pada Sabha juga dikeluarkan Piagam Parisada. Piagam ditandatangani oleh 20 orang, delapan delegasi perwakilan pemerintah dan 12 dari perwakilan organisasi keagamaan Bali, seperti: Perhimpunan Buddhis Indonesia Bali Dharma Yadnya; Partai Nasional Agama Hindu Bali; Majelis Hinduisme, Wiwada Sastra; Sabha Satya Hindu Dharma; Perhimpunan Hidup Ketuhanan; Angkatan Muda Hindu Bali Kumara Bhuwana; Yayasan Dwijendra; Eka Adnyana Dharma; Persatuan Keluarga Bujangga Waisnawa, dan Paruman Para Pandita.

Kelahiran Parisada Darma Hindu Bali menandai corak baru dalam aktivisme intelektual Bali yang sebelumnya lebih banyak ruang diskursusnya berlangsung di berbagai perkumpulan. Nama Parisada sendiri belum pernah digunakan sebelumnya di Bali. Menurut Picard (2020), istilah *Parishad* diambil dari *Manawa Dharmasastra* yang dipopulerkan kembali para Reformis Hindu di India pada abad IX untuk menyebut organisasi keagamaan baru Pan-Hindu dan membedakan dari organisasi tradisional, seperti: *Sampradaya*, dan juga ordo-ordo keagamaan berdasarkan garis keguruan (parampara). Selanjutnya, penamaan Parisada juga digunakan oleh Visva Hindu Parishad yang didirikan pada 1964 untuk mempertahankan, mempromosikan dan menyebarkan Hinduisme di seluruh dunia.

Di Indonesia, oleh para perancanganya, Parisada ditempatkan sebagai Majelis persatuan dan pelebagaan Agama Hindu. Dalam piagam yang dikeluarkan pada Hindu Bali Sabha, PDHB diberikan tugas yang cukup besar yakni: mengatur, memupuk dan memperkembangkan Agama Hindu-Bali. Dengan posisi seperti itu, Parisada menjadi sebuah Majelis yang hegemonik, berada di atas, memayungi perkumpulan-perkumpulan yang sudah ada.

Pada fase awal kehadirannya, PDHB lebih banyak berkutat pada perumusan dasar-dasar Agama Hindu-Bali yang bisa dijadikan pegangan bersama, mulai dari penyusunan sistem ritual, masalah kependetaan, menstandarkan Pura, penerbitan Warta Hindu Dharma sampai dengan menyiapkan bahan pendidikan agama untuk sekolah dan masyarakat. PDHB juga mengeluarkan putusan tentang *Dharma Prawrtti* Sastra sebagai pedoman pengajaran agama untuk sekolah, penetapan tahun baru *Saka* dan memutuskan hari raya yang akan dijadikan hari libur umum.

Pada November 1961, PDHB menghasilkan Piagam Campuan yang berisikan dua hal pokok; *Dharma Agama* dan *Dharma Negara*. Selain itu, diputuskan pendirian sebuah Pura jenis baru di pusat kota Denpasar yang diberi nama Pura Jagatnata. Berbeda dengan pura-pura yang sudah ada di *wewidangan* desa adat. Di Pura Jagadnata hanya ada satu palinggih *Padmasana* untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Inisiatif lain yang juga diputuskan di Campuan adalah harapan untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu agama (*asrama Pangadyayan*) di Denpasar, yang akhirnya terealisasi pada 1963.

Pada Sabha (pertemuan) yang diselenggarakan tahun 1963, PDHB berubah nama menjadi Parisada Hindu Darma (PHD) untuk menegaskan sifat universalitas agama Hindu diperkuat

dengan penyampaian *Panca Sraddha* sebagai kanon teologis agama Hindu. Selain itu dikenalkan pula *Upadesa* tentang Ajaran-ajaran Agama Hindu. *Upadesa* yang disusun oleh Tim yang terdiri dari: Ida Pedanda Gde Wayan Sidemen, Cokorda Rai Sudharta, Ida Bagus Oka Punyatmaja dan Ida Bagus Gde Dhosher. Selanjutnya *Upadesa* dijadikan bahan pelajaran agama Hindu di sekolah-sekolah. Meskipun Sabha merumuskan kanon yang universal, PHD juga mengambil keputusan terkait dengan desa adat, banjar dan subak.

Selanjutnya dalam setiap Mahasabha, Parisada mengeluarkan keputusan terkait pembakuan atau standarisasi prosedur, ritual dan tempat ibadah. Pada Mahasabha ke-5 (1986), Parisada melakukan sistimatisasi berbagai metode pembinaan agama, melengkapi pendidikan agama formal mulai dari PAUD sampai universitas. Pada 1990, Parisada juga mendorong penerbitan buku-buku bagi umat Hindu, menerjemahkan kitab-kitab Weda ke bahasa Indonesia dan mengenalkan *Kramaning Sembah*.

Invensi kelembagaan dengan mendirikan Parisada sebagai Majelis tertinggi agama Hindu berskala nasional, memberi peluang lebih besar bagi kalangan intelektual untuk menyatukan rumusan kanon teologis yang bersifat universal, membakukan bahan ajar agama Hindu serta menstandarisasi sistem ritual yang berlaku di berbagai tempat di Indonesia. Sampai di titik ini proses penyatuan dan pelembagaan agama Hindu di Indonesia telah membuahkan hasil. Dan capaian ini menjadi prestasi tersendiri, karena di berbagai negara, termasuk India sekalipun, penyatuan dan pelembagaan berbagai variasi aspirasi Hinduisme dalam sebuah Lembaga tunggal seperti Parisada, sering mengalami kesulitan atau bahkan hanya berhenti jadi sebatas cita-cita.

Kembali ke Dalam Pusaran

Ketika Parisada ditempatkan sebagai Majelis tertinggi agama Hindu yang bersifat tunggal, tersentralisir dan berskala nasional, pilihan ini pasti menimbulkan kosekuensi. Parisada akan masuk dalam pusaran baru. Parisada menjadi medan baru yang menggantikan saluran aspirasi dan arena perdebatan sebelumnya. Hal ini nampak jelas dari dinamika yang terjadi di tubuh Parisada, sejak awal berdiri sampai dengan hari ini.

Pusaran pertama terkait *power structure* dalam Parisada; apa institusi yang paling inti dari Parisada? Siapa yang ditempatkan sebagai ketua umum Parisada? Apakah ketua umum Parisada dari kalangan sulinggih ataukah dari *walaka*?

Pada awal berdirinya, ketua umum Parisada adalah seorang Sulinggih, dan di dalamnya ada dua dewan: Pesamuhan Para Sulinggih yang beranggotakan sebelas orang dan Pesamuhan Walaka yang berjumlah 22 orang, didampingi pengurus harian sebanyak 3 orang. Dengan menempatkan sulinggih sebagai ketua umum maka Parisada ingin ditempatkan sebagai Majelis *Brahmana Sista* yang menghasilkan Bhisama, mirip dengan struktur Majelis Syuro di Nahdlatul Ulama.

Penempatan sulinggih sebagai ketua umum Parisada menimbulkan perdebatan karena posisi sulinggih dianggap tidak tepat dan tidak pantas terlibat dalam aktivitas organisasi sehari-hari.¹⁰⁾ Akhirnya, pada Mahasabha PHDI ke 8, tahun 2001 diambil keputusan ketua umum pengurus harian dijabat dari kalangan welaka dan sulinggih diposisikan sebagai *Dharma Adhyaksa*.

Pusaran kedua terkait dengan isu representasi (keterwakilan). Parisada mewarisi pergulatan lama yang belum sepenuhnya

selesai ditambah dengan munculnya elemen-elemen baru yang ingin terakomodasi dan terwakili di Parisada. Berbagai kelompok keumatan baik yang bersifat askriptif/soroh/warga, lintas soroh, representasi non etnik Bali, Sampradaya, dan sebagainya, ingin terwakili dalam Mahasabha dan kepengurusan Parisada, khususnya dalam kepengurusan PHDI Pusat. Keterwakilan bukan hanya simbolik, tapi lebih substantif dan politis karena keterwakilan di Mahasabha dan Parisada dipandang sebagai kunci penting dalam proses pengambilan keputusan/ Bhisama yang berdampak luas pada umat Hindu.

Isu keterwakilan menimbulkan titik panas dalam setiap Mahasabha. Muncul pro-kontra terhadap kehadiran suatu/beberapa kelompok, baik dalam kepesertaan Mahasabha maupun dalam kepengurusan Parisada.¹¹⁾Tuntutan representasi

¹⁰⁾ Tuntutan agar ketua umum PHDI tidak dijabat dari kalangan sulinggih muncul menjelang Mahasabha PHDI ke-7 tahun 1996 di Surakarta. Argumen pengusungnya adalah untuk menghindari sulinggih terlibat dalam perselisihan organisasi atau politik. Sehingga sulinggih bisa mengabdikan diri pada persoalan agama semata. Sebaliknya, kubu yang berseberangan tetap ingin mempertahankan posisi Sulinggih sebagai Ketua Umum PHDI. Kubu ini menempatkan Parisada sebagai Brahmana Sista (Paruman Sulinggih). Dalam konsep ini yang disebut ini Parisada adalah Paruman Sulinggih. Paruman Sulinggih jadi pusat power structure bukan walaka. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibentuk Paruman Walaka dan Pengurus Harian sebagai pelaksana harian. Dengan demikian, dalam pandangan kubu ini, Ketua Umum Parisada seharusnya Sulinggih.

¹¹⁾ Titik panas terjadi dalam beberapa kali Mahasabha. Isu utama terkait keterlibatan Sampradaya sebagai peserta Mahasabha. Terjadi pro dan kontra. Kelompok kontra menyampaikan secara terbuka sikap penolakannya terhadap kehadiran Sampradaya dalam Mahasabha dan Kepengurusan Parisada. Selanjutnya hal ini memunculkan perpecahan di tubuh Parisada Bali (2001-2007). Sebagai kelanjutan konflik yang terjadi, pada tahun 2007 dideklarasikan Parisada Dharma Hindu.

berbagai ragam kelompok membuat beberapa kali terjadi perluasan jumlah keanggotaan baik di Sabha Pandita maupun Sabha Walaka.¹²⁾

Pusaran ketiga terkait dengan persoalan independensi (kemandirian). Parisada jelas tidak berada di ruang vakum. Parisada harus berhadapan dengan kepentingan eksternal, terutama kepentingan Negara. Kepentingan Negara atas Parisada dan umat Hindu juga bisa berubah-ubah dari masa ke masa. Di sisi lain, sebagai majelis, Parisada selalu diharapkan sebagai *defender* (pelindung dan pengayom) umat dari kepentingan eksternal dan juga sekaligus saluran aspirasi umat ke Negara. Sampai di sini Parisada harus memainkan keseimbangan: antara kepentingan umat dan kepentingan Negara.

Sepanjang masa Orde Baru (1966-1998), organisasi Hindu berskala nasional tumbuh dengan subur. Dimulai dengan Prajaniti yang secara resmi lahir pada tanggal 19 Juni 1968. Kemudian diikuti dengan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia yang lahir 1984. WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) didirikan pada 12 Februari 1988. Diikuti oleh pendirian Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI) pada 1991. Dua tahun berselang berdiri Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDl) tahun 1993.

Terlepas dari kepentingan umat Hindu untuk mendirikan bermacam-macam organisasi massa/ perkumpulan, politik korporatisme negara yang dijalankan Orde Baru, menjadikan

¹²⁾ Kelompok yang kontra menolak soroh sebagai wacana dalam mekanisme kelembagaan dan pelaksanaan tugas Parisada karena berpandangan bahwa Parisada bukan perwakilan Soroh, melainkan perwakilan umat.

organisasi harus bersifat tunggal. Parisada dan juga ormas bernafaskan Hindu tidak bisa menghindar dari kontrol aparatus negara. Semua organisasi kemasyarakatan diatur dan digiring untuk berafiliasi ke Golkar. Demikian pula dengan pendirian organisasi baru sejenis, hasil faksionalisasi, tidak akan diakui negara. Negara memegang otoritas tunggal untuk menentukan keabsahan kepemimpinan organisasi. Inilah yang pernah dialami Pemuda Hindu Indonesia (PHI) yang ingin mendirikan organisasi baru lepas dari Peradiah Indonesia.

Sikap lunak Parisada pada kekuasaan Negara, selalu memunculkan kritik. Kritik yang paling ramai adalah terkait keterlambatan respon Parisada pada pembangunan/ investasi pariwisata yang dianggap merugikan kepentingan umat Hindu.¹³⁾ Ketidakhadiran Parisada dalam masalah-masalah yang bersinggungan dengan kekuasaan Negara, memunculkan istilah "Parasede". Walaupun demikian, ada juga sejumlah pembelaan terkait posisi yang diambil Parisada. Para pembela menyebutkan sikap Parisada sebagai strategi untuk melindungi umat Hindu yang minoritas. Disebutkan Parisada harus pintar bermanuver membaca arah angin sehingga tidak terhempas badai.

Pusaran keempat adalah tarik menarik di antara tiga arus besar: Hindu lokal (Bali), Hindu nasional (Parisada) dan Neo Hinduisme-India. Tarik menarik ini tidak bisa dihindari, ketika prioritas awal

¹³⁾ Salah satu kritik yang cukup ramai adalah terkait protes pada pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR) pada kurun waktu 1993-1994. Pada tahun 1995 terbentuk Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia (FPHDI) yang bertujuan membela umat Hindu dari berbagai serangan.

perjuangan para intelektual Bali adalah untuk mendapatkan pengakuan dari Negara. Hal itu dilakukan dengan mereformulasi kanon Hindu, dari Hindu-Bali menjadi lebih bersifat nasional dan bahkan universal. Para intelektual saat itu merumuskan dasar-dasar agama Hindu-Bali yang selanjutnya menjadi kanon teologis untuk dijadikan pegangan bersama.

Pada Mahasabha ke-2 tahun 1969, Parisada menegaskan perbedaan agama dengan adat. Agama ditempatkan sebagai sesuatu yang abadi dan universal, sedangkan adat akan bervariasi menurut tempat, waktu dan keadaan (Desa, Kala, Patra). Sehingga adat yang dilestarikan adalah adat yang sesuai dengan ajaran agama. Ini ditegaskan lagi pada Mahasabha ke-4 tahun 1973 untuk membedakan dengan jelas antara adat dan agama. Itu artinya Hindu nasional yang dibawa Parisada menekankan pada dasar-dasar teologi dan etika yang bersifat universal. Sedangkan ritual-adat diserahkan pada komunitas lokal yang beragam.

Tapi, bagi pengkritiknya, upaya pe-nasional-an itu tidak sepenuhnya memuaskan. Hindu nasional masih dianggap sebagai proses bias Balinisasi (Hindu Bali) dan lebih jauh lagi India-nisasi (Hindu India). Perumusan sistem kehinduan nasional dianggap sentralisasi dan penyeragaman pada pemeluk Hindu non etnik Bali yang beragam. Akibatnya tradisi lokal yang diwarisi turun temurun menjadi terpinggirkan oleh Kehinduan versi Parisada. Maka sebagai responnya, muncul gerakan pelokalan Hindu yang mengusung tema Hindu Nusantara. Bahkan muncul usulan agar kelembagaan Parisada menjadi federatif/ konfederatif, dengan membuka ruang munculnya Parisada Hindu Bali, Parisada Hindu Kaharingan, Parisada Hindu Tolotang dan sebagainya.¹⁴⁾

Kembali Melihat Akar Rumput

Pergerakan Hindu sesungguhnya tidak hanya berputar di Parisada. Kita perlu melihat lebih tajam lagi aktivisme yang hidup di akar rumput, terutama di kantong-kantong umat di luar Bali. Karena secara demografis, umat Hindu semakin tersebar, tidak hanya berpusat di Bali. Kantong-kantong umat mulai bertambah di luar Bali, terutama di provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sebagian berasal dari etnik Bali dan etnik Jawa perantauan, sebagian lagi warga lokal yang menyatakan diri sebagai penganut Hindu. Generasi awal warga Hindu-Bali dan Hindu-Jawa di perantauan berasal dari program transmigrasi. Generasi berikutnya terjadi karena migrasi swakarsa karena pekerjaan dan lain-lain. Pola pemukiman umat di luar Bali juga beragam. Ada model yang berkelompok (*mesebun*) dalam satu kawasan seperti halnya pola pemukiman di Bali. Tapi juga ada pola pemukiman tersebar.

Pengakuan dari Negara selalu membuka ruang yang lebih leluasa bagi umat Hindu di luar Bali untuk mengekspresikan dirinya.

¹⁴⁾ Gerakan pelokalan juga terjadi di Bali. Pada tahun 2007 dideklarasikan pendirian Parisada Dharma Hindu Bali yang menyatakan kembali ke agama Hindu-Bali. Kata Bali pada Hindu Bali ditafsirkan tidak mengacu pada pulau tetapi berarti banten. Disebutkan agama Hindu Bali diartikan agama Hindu yang menggunakan berbagai sesajen untuk menyembah Ida Sang Hyang Widhi. Dalam perkembangan selanjutnya, wacana kembali ke Agama Hindu-Bali muncul lagi pada tahun 2020-2021 terkait dengan reaksi terhadap Sampradaya. Isu yang diangkat adalah ancaman konversi internal yang dianggap merusak sendi-sendi Agama Hindu-Bali yang berdasarkan perpaduan agama Hindu dan adat dresta Bali. Muncul tuduhan kepada Sampradaya yang dianggap agresif, meng- agamakan orang yang sudah beragama.

Pengakuan negara sangat membantu peningkatan kepercayaan diri, terutama umat non etnik Bali untuk menyatakan diri sebagai Hindu. Karena sebelumnya, terutama di era 1960/1970-an, masih dijumpai semacam ketakutan untuk menampilkan identitas umat Hindu secara terbuka. Ekspresi ke-Hinduan dilakukan secara senyap agar selamat. Tekanan dari lingkungan eksternal sangat besar, sehingga membuat umat harus bermanuver dengan menyembunyikan identitas sebagai umat Hindu. Sebagian tidak mampu bertahan, dengan memutuskan melakukan konversi agama.

Dari kisah tersebut, pengakuan negara bukan senjata sapu jagat. Memang sudah terjadi perbaikan ruang kebebasan beribadah setelah reformasi (1999), namun bukan berarti setiap jalan menjadi mudah. Di beberapa daerah, umat Hindu masih mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan pendirian tempat ibadah. Apalagi di luar Bali, pola pemukiman umat seringkali tersebar. Sehingga, umat Hindu di luar Bali masih menghadapi hambatan untuk memenuhi syarat pendirian tempat ibadah yang diatur dalam SKB Tiga Menteri.

Ancaman konversi agama masih tetap terjadi, baik di Bali maupun di luar Bali. Beberapa waktu lalu muncul berita viral di media sosial terkait konversi agama umat Hindu-Jawa di Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah. Disebutkan ada 66 KK yang dulunya pemeluk Hindu etnik Jawa telah berpindah agama.

Ni Kadek Surpi Aryadhana (2011) dengan mengambil kasus konversi agama di Bali menyebutkan tidak ada faktor tunggal dalam konversi agama. Konversi agama terjadi karena berbagai faktor: mulai ketidakpuasan atas sistem adat dan agama, lemahnya *Sraddha*-pemahaman teologis, krisis individu, keretakan keluarga dan urbanisasi, pengaruh ilmu kebatinan, pernikahan, kehausan rohani dan janji keselamatan, dan juga

problem ekonomi-kemiskinan. Pengalaman Bali dalam masalah konversi agama bisa berulang di daerah-daerah di luar Bali. Apalagi daya tahan ekonomi semakin terkikis oleh lemahnya solidaritas antar umat.

Soal lemahnya *Sraddha* memang soal klasik karena belum semua umat Hindu tersentuh oleh pendidikan agama. Situasinya memang serba terbatas mulai dari keterbatasan guru agama, buku-buku ajar agama Hindu sampai dengan langkanya *dharma duta*.

Semua masalah di akar rumput melahirkan para pembela dan pejuang yang tetap bergerak di tengah kesulitan. Mereka banyak melakukan inovasi sehingga umat Hindu masih tetap bertahan. Pendeta Kumari yang tumbuh di komunitas Dayak Maratus Kalimantan Selatan memiliki energi yang luar biasa dengan memberikan darma wacana masuk sampai ke kantong-kantong umat di pelosok-pelosok yang terisolir. Semua wilayah umat Dayak Maratus tempatnya jauh terpencil di pedalaman dengan akses jalan cukup sulit.

Di Tana Toraja, kita akan mendengar kisah seorang tokoh bernama Bapak K'ila, yang saat ini *sampun newata*. Beliau tokoh di balik integrasi Komunitas *Alukta/ Aluk Todolo* ke dalam Hindu pada 1969. Di komunitas Kei, desa Tanimbar, muncul Bapak Miswar Yamko, yang menjadi penggerak suku Kei yang beragama Hindu. Miswar mempelopori pembangunan Pura di Tanimbar dengan tetap mempertahankan Bae Leo, ciri khas pemujaan tradisi suku Kei. Di Pulau Buru, ada Bapak Lintas Reslessi yang mengumpulkan doa-doa asli suku Buru dan memperkuat kepercayaan diri suku Buru untuk ber-KTP Hindu. Kita juga mendengar perjuangan Bapak Paty Nahatue yang mengajak suku Naulu untuk menggali adat dan tradisi suku Naulu agar suku Naulu bangga menjadi Hindu.

Di Gunung Kidul, Yogyakarta, ada figur penggerak seperti Mas Purwanto. Pada umur yang masih muda (39 tahun), terpilih kembali menjadi Ketua PHDI Kabupaten Gunung Kidul untuk periode kedua. Mas Purwanto melakukan banyak terobosan, dari gerakan 1000 pelinggih, membangkitkan kembali ritual- ritual Hindu Jawa, pemberdayaan ekonomi umat di bidang pertanian, sampai dengan inovasi pendidikan pasraman.

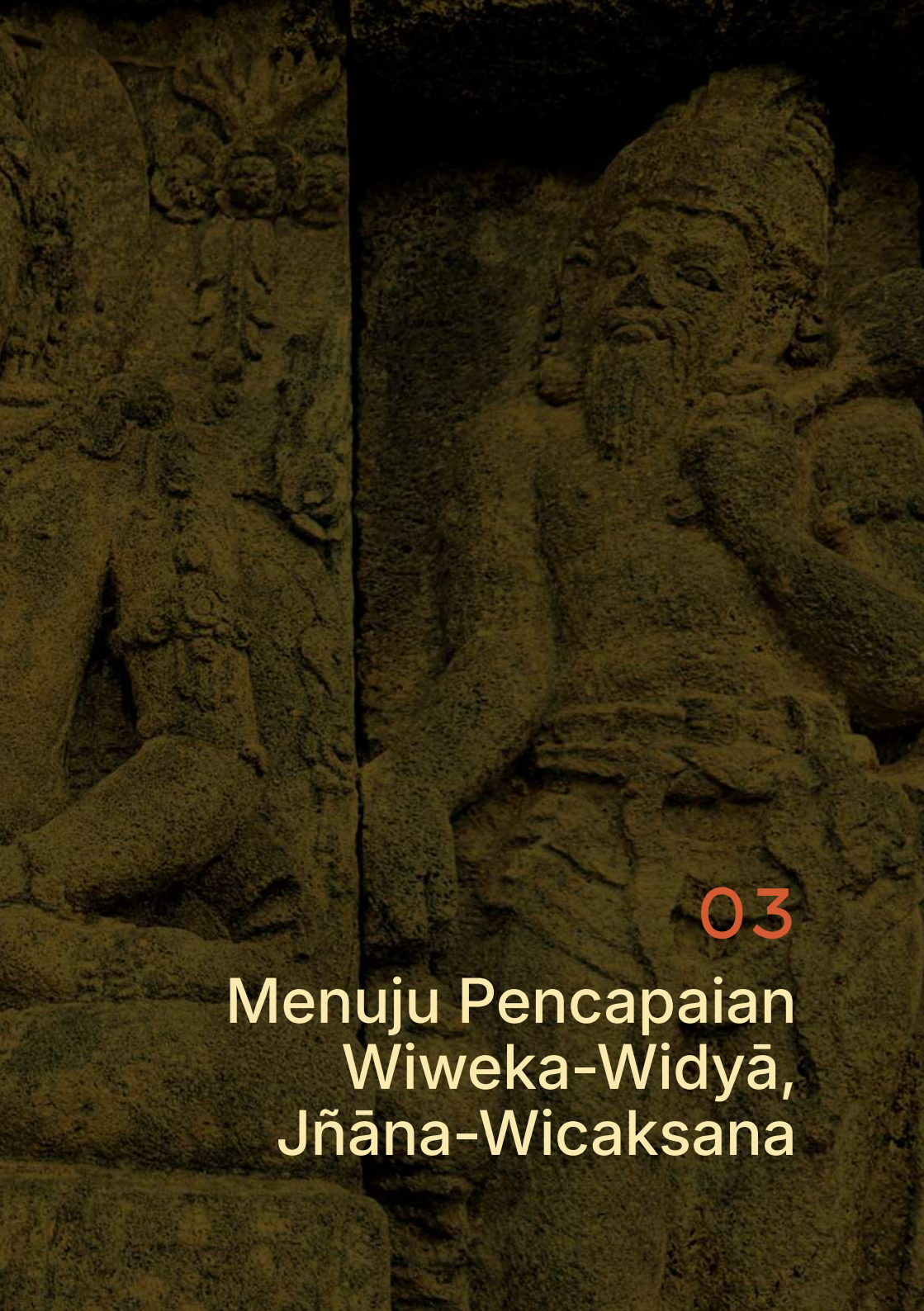
Saya tidak bisa menyebut satu persatu penggerak Hindu di akar rumput. Saya kira masih banyak figur-figur seperti Pendeta Kumari, Bapak Miswar Yamko dan Mas Puwanto. Kehadiran mereka membuat kita mempunyai harapan, bahwa mereka melakukan itu bukan hanya untuk membuat Hindu di Indonesia bisa bertahan, tetapi mereka bergerak untuk kehidupan umat Hindu yang lebih baik. Semoga semesta mendukung perjuangan mereka.

Catatan Penutup : Keluar dari Pusaran

Saya harus mengakhiri *kriya patra* sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini, bisa bermanfaat bagi para Sujana di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa.

Saya menyadari bahwa untuk melihat masa depan aktivisme Hindu, kita tidak boleh berhenti pada kajian di tataran elit, termasuk hanya melihat kiprah para intelektual organik saja. Karena masa depan Hindu, untuk keluar dari pusaran, sesungguhnya berada di tangan anak-anak muda dan para penggerak Hindu di akar-akar rumput. Untuk itu *kriya patra* ini harus ditempatkan sebagai kajian awal, yang harus dilanjutkan dengan studi-studi berikutnya.



The background of the image is a close-up of an ancient stone relief sculpture. It depicts a large, bearded figure, likely a deity or a royal figure, with a prominent beard and a crown-like headpiece. The figure is shown in a seated or standing pose, with intricate carvings of clothing and jewelry. The stone is a warm, brownish-gold color, and the lighting highlights the texture and depth of the relief. The overall composition is vertical, with the figure occupying most of the frame.

03

Menuju Pencapaian
Wiweka-Widyā,
Jñāna-Wicaksana

Menuju Pencapaian Wiweka-Widyā, Jñāna- Wicaksana¹⁵⁾

Dari awal, sejak saya diangkat menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi, saya ingin sekali berkunjung ke seluruh perguruan tinggi agama Hindu di seluruh Indonesia, termasuk ke IAHN Gde Pudja Mataram. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia dan STAHN Mpu Kuturan Singaraja. Saya juga sempat melihat dari dekat kampus IAHN Tampung Penyang Palangkaraya.

Sebulan yang lalu saya hadir memberikan orasi ilmiah di STAH Dharma Nusantara Jakarta. Saya juga sempat tatap layar dengan civitas akademika STHD Klaten, Jawa Tengah. Dan, hari ini, saya sangat gembira bisa *mararasan*, *magesah*, bersama para dosen, mahasiswa dan wisudawan IAHN Gde Pudja Mataram. Saya beruntung bisa mengikuti dan mengawal proses peningkatan status tiga perguruan tinggi Hindu negeri di era pemerintahan Presiden Jokowi.

¹⁵⁾ Disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana S2 Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, 29 November 2021.

Peningkatan status yang pertama adalah peralihan dari STAHN Tampung Penyang Palangkaraya ke IAHN Tampung Penyang Palangkaraya pada tahun 2018. Peningkatan status yang kedua adalah peralihan dari STAHN Gde Pudja Mataram ke IAHN Gde Pudja Mataram pada tahun 2020. Peningkatan status yang ketiga, yang cukup membanggakan bagi kita semua, Presiden Jokowi memutuskan untuk meningkatkan status IHDN Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Universitas Hindu negeri pertama di Indonesia.

Perguruan tinggi agama Hindu harus tumbuh mekar dalam taman sari Indonesia. Tumbuh, bukan hanya untuk membuktikan eksistensi, bahwa Indonesia memang memiliki identitas agama yang bhinneka, ber-warna- warni. Tapi, perguruan tinggi agama Hindu harus tumbuh untuk membentuk jati diri manusia Hindu, sebagai Manusia Tattwa yang unggul dan berkarakter.

Untuk bisa tumbuh menjulang tinggi, mampu memekarkan bunga, dan menghasilkan buah, memerlukan akar yang kuat yang tertanam dalam tanah yang subur. Inilah fondasi dasar yang harus kita bangun bersama. Tidak mungkin, kita mampu menghasilkan pohon Manusia Tattwa jika kita tidak menjaga dan merawat kesuburan tanahnya. Subur atau tidaknya tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tanah merupakan tempat tanaman agar dapat tumbuh, mendapatkan air, unsur hara, udara dan sebagai tempat hidupnya mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanaman.

Tugas kita semua, untuk memupuk tanaman agar memberi kecukupan unsur hara. Kewajiban kita semua untuk memastikan ketersediaan air yang cukup agar pohon Manusia Tattwa tidak layu. Tanggung jawab kita semua memastikan agar

akar bisa “memeluk bumi”, yang membuat tanaman Manusia Tattwa bisa bertahan dari angin dan badai. Kadang kita harus mempertahankan dan mengembalikan kesuburan tanah dengan konservasi tanah dan air.

Inilah tanggung jawab moral dari dunia pendidikan. Memperkuat akar untuk bisa memetik buah karma kebaikan, melahirkan para sujana yang akan terlahir dari pohonnya, lalu melanjutkan lagi tugas sejarahnya membentuk pohon-pohon yang baru. Kita berharap pohon-pohon yang baru tumbuh akan memberi kerindangan, keteduhan dan kemanfaatan bagi semesta.

Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pohon manusia Tattwa? Semua orang pasti bangga setelah pohon berbunga, mekar dengan indahnya atau senang setelah pohon berbuah lebat. Tapi kadang lupa, bahwa kita harus “menanam karma” dengan ikut menanam, menjaga dan merawatnya. Itu artinya, tugas besar pendidikan, jangan hanya diserahkan pada institusi pendidikan formal, tapi menjadi kewajiban kita semua untuk ikut menjaganya. Tugas dari para sulinggih, para sujana, tugas dari para orang tua dan juga semua institusi sosial dalam masyarakat.

Jangan lupa pendidikan bukan semata-mata *transfer of knowledge*, tapi juga *transfer of values*. Proses penanaman nilai-nilai adiluhur, kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencapai *Wiweka-widyā* dan *Jñāna-wicakṣaṇa*. Proses pendidikan bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan *widyā*, tapi juga menembus olah kepekaan *jñāna* hingga berpuncak pada *kawicakṣaṇan* atau *wisdom*.

Kewicaksanaan adalah puncak pencapaian terakhir Manusia Tattwa. Kita memang perlu SDM Hindu yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Tapi, itu tidak cukup karena harus dilanjutkan

dengan mendapatkan SDM Hindu yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, terasah kepekaan *jñāna*-nya dan yang utama, mengedepankan kebijaksanaan dalam salampah lakunya.

Saya ingin mengangkat tema *Jñāna-Wicakṣaṇa* ini secara khusus sebagai tema orasi ilmiah pada hari ini karena pada saat ini kita sering dihadapkan pada persoalan intoleransi dalam relasi antarmanusia, bahkan dalam relasi antaragama. Dan yang menariknya, tindakan intoleransi justru dilakukan oleh orang-orang cerdas dan orang-orang terdidik, lulusan perguruan tinggi. Tambah menarik tindakan tidak toleran itu membawa-bawa nama Tuhan, Kitab suci dan juga para orang-orang suci (Nabi).

Fenomena ini membuat kita merenung. Apa ada yang salah dari proses transfer nilai dalam pendidikan, termasuk pendidikan agama sehingga melahirkan orang-orang yang intoleran, mengambil posisi esktrēm dan radikal. Mengapa mereka sampai berpikir ekstrem, menganggap orang yang berbeda antara ada dan tiada, atau bahkan lebih rendah dari diri dan kelompoknya. Lebih jauh lagi, berpandangan “the others” sebagai musuh dengan kejahatan yang harus dilenyapkan.

Nyisik Bulu

Pertanyaan-pertanyaan itu, membuat kita harus “nyisik bulu”, memeriksa lagi secara dalam diri kita, tanpa harus menyalahkan orang lain. Karena fenomena intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme bukanlah khas sebuah agama. Hampir semua institusi agama-agama di dunia mengalami masalah ini dalam ruang-ruang internalnya.

Saya mencoba melihat berbagai pustaka lintas-keilmuan yang mengangkat soal fenomena intoleransi dalam setiap

peradaban. Seorang filsuf dan sastrawan yang bernama Eric Hoffer, menyebut setiap ideologi berpotensi melahirkan *The true believer*, yang sering menghasilkan para penganut fanatik, yang akhirnya tidak toleran terhadap ideologi lain. Kita sudah menyaksikan dalam rentang sejarah yang panjang, upaya para Demagog mempengaruhi massa pengikutnya untuk menegakkan kemurnian ideologi secara totaliter, serta menjadikan ideologi lain sebagai penyakit yang harus dibasmi. Tapi, sebaliknya, kita juga melihat upaya orang-orang besar dalam sejarah kemanusiaan, yang berupaya untuk menyatukan atau bahkan melakukan sinkretisme ideologi, merangkum dan merangkul berbagai spektrum ideologi untuk membangun harmoni sosial.

Ideologi bukan satu-satunya produsen intoleransi. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa bibit radikalisme dan intoleransi yang bersumber pada agama jauh lebih berbahaya. Legitimasi kebenaran agama yang bersifat absolut cenderung men-subordinasi semua pandangan, sikap, maupun kelompok lain. Dan ketika dilengkapi *reward and punishment* yang melampaui batas-batas realitas, pandangan absolut itu berpotensi memicu sikap dan tindakan destruktif yang membahayakan kehidupan bersama.

Menjadi *True Believer* bukanlah sebuah persoalan, jika para penganut memiliki keyakinan bahwa apa yang diyakini/dianutnnya sebagai kebenaran atau yang paling benar. Tapi, yang menjadi persoalan adalah ketika klaim kebenaran itu dibangun dengan menganggap keyakinan bahwa yang lain tidak benar, tidak perlu ada, lebih rendah dan harus diperangi atau dilenyapkan.

Tantangan para *true believer* adalah dunia yang menjadi rumah besar kita bersama saat ini bukanlah dunia yang homogen.

Lanskap sosial agama saat ini sangat berbeda dibanding masa pertumbuhan agama-agama. Agama Hindu yang tumbuh dalam lanskap India, Islam dari Timur Tengah, Kristen dari Eropa, dan agama-agama lain, semua terhubung dalam komunitas global yang difasilitasi perkembangan teknologi. Agama-agama yang dulu tumbuh dan berkembang dalam ruang homogen, kini saling berinteraksi dengan agama lain dalam ruang yang makin heterogen, makin multi-kultur.

Saat ini, proses migrasi terjadi lintas benua secara intensif dan masif. Membawa identitas budaya dan gaya hidupnya masing-masing. Eropa yang dulunya homogen, saat ini semakin *browning*, karena kehadiran imigran dari Asia dan juga Afrika. Akibatnya, pengelolaan masyarakat yang multi-kultur menjadi tantangan Eropa hari ini.

Kehadiran identitas budaya-agama yang majemuk dalam satu ruang inilah yang memunculkan gesekan dan ketegangan di berbagai penjuru dunia. Rasisme merebak atas nama klaim teritorial berdasarkan keunggulan ras. Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan identitas juga semakin fenomenal. Hal ini membuat Samuel P. Huntington, dua puluh lima tahun yang lalu, memperingatkan potensi *clash of civilization*, benturan antar peradaban yang salah satu pemicunya adalah lahirnya politik identitas, atas nama suku, agama, bahasa dan juga ras.

Menciptakan Kewarasan

Apakah ada jalan keluar di tengah mengentalnya politik identitas ini? Jawabnya adalah kewicaksanaan, memuliakan pikiran-pikiran waras yang menghindari titik ekstrim dengan membuka ruang-ruang dialog untuk mencari titik temu.

Kita harus memperbanyak orang-orang yang mau berpikir di tengah, bukan di dua titik ekstrim. Mengambil jalan tengah bukan berarti menghilangkan identitas atau menurunkan keyakinan atas agama masing-masing. Jalan tengah adalah sikap terbuka atas perbedaan dan keragaman. Dan bukan hanya sekedar merayakan perbedaan, tapi berikhtiar untuk terus menerus berdialog mencari titik-titik persamaan, menemukan *common words* dan *common platform*, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah bersama.

Untuk menempuh jalan tengah, kita harus sampai pada *Jñāna-Wicakṣaṇa*, ilmu pengetahuan yang diperoleh harus mau dan mampu dibawa ke pemikiran moderat. Tapi harus disadari, mengambil posisi moderat tidak jatuh dari langit. Ketika setiap agama berpotensi untuk ditafsirkan secara moderat maupun secara radikal, lanskap sosial kita pun bisa mengondisikan setiap penganut agama untuk menjadi moderat maupun menjadi radikal.

Karena itu, menciptakan moderasi, tidak cukup menjadi laku individual tapi harus dibangun secara kolektif, menjadi sebuah gerakan bersama. Dalam kacamata ini, moderasi beragama adalah upaya bersama bagi seluruh umat manusia untuk memuliakan kemanusiaan, menghindarkan umat manusia dari jurang kehancuran akibat konflik politik identitas.

Terkait dengan penguatan gerakan moderasi beragama, ada beberapa langkah yang saya tawarkan:

Pertama, kita perlu memperkuat rujukan-rujukan teologis yang mempertegas posisi agama sebagai ajaran moderat, melalui kajian-kajian intra agama maupun lintas agama. Kita perlu memperkuat penggalan nilai-nilai toleransi, keterbukaan dan

kemanusiaan dalam ajaran Agama Hindu. Di saat yang sama, kita juga harus membangun kesepahaman dengan agama lain, terkait nilai-nilai lintas agama yang menempatkan kemanusiaan di atas semua perbedaan.

Kedua, kajian-kajian dan rujukan teologi moderat juga harus disuarakan secara lantang melalui kampanye dan gerakan moderasi beragama. Hal ini sangat penting, mengingat agama sebagai sumber nilai dan pengetahuan telah lama menjadi legitimasi kebenaran yang terisolir. Tak heran, jika banyak doktrin agama saat ini bias nilai- nilai eksklusif dan intoleran. Upaya menyuarakan faham moderat ini adalah bentuk *counter-hegemony* untuk membangun tradisi moderasi, toleransi, dan inklusivitas.

Seperti halnya kajian teologi, kampanye dan gerakan moderasi beragama juga harus dilakukan dalam lingkup intra agama maupun lintas agama. Dalam lingkup intra agama, gerakan moderasi bisa memanfaatkan organisasi dan perkumpulan keagamaan dari level nasional hingga level komunitas dan keluarga. Adapun pada lingkup antaragama, gerakan moderasi bisa dilakukan melalui berbagai agenda solidaritas. Salah satu kegiatan yang bisa ditradisikan, yaitu solidaritas pengamanan dan penjagaan pada setiap perayaan atau hari besar keagamaan.

Umat Hindu bisa membantu menjaga dan mendukung pelaksanaan hari besar agama lain, dan sebaliknya, umat beragama lain juga bisa dilibatkan dalam berbagai perayaan hari besar Agama Hindu. Gerakan ini bisa diorganisasikan secara rapi dan terstruktur dari level nasional hingga level komunitas, sehingga memperkuat penghormatan pada tradisi dan menempatkan perbedaan agama sebagai sesuatu yang biasa.

Yang tak kalah penting, berbagai kajian dan gerakan moderasi harus disuarakan secara lantang dan intensif dalam berbagai ruang publik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Cara ini sangat efektif untuk mempengaruhi persepsi dan tindakan publik di era *post truth* saat ini, di mana orang cenderung memilih dan mengambil kesimpulan berdasar perasaan suka dan tidak suka, atau berdasar kenyamanan dan kebiasaan.

Maka, inovasi dan kreativitas sangatlah penting dalam menjalankan kampanye moderasi beragama. Para aktivis dan pegiat moderasi perlu membekali diri dengan teknik komunikasi, *skill content creator*, teknik mengelola MedSos, dan sebagainya. Dengan begitu, nilai dan tradisi moderat akan menghegemoni dunia nyata maupun dunia maya, dan akhirnya akan menjadi mainstream dominan bagi setiap umat beragama.

Memoderasi Ruang Publik

Sejalan dengan upaya merebut penguasaan wacana di dunia nyata dan dunia maya, pendekatan dialog juga harus digalakkan. Mengutip istilah Laclau & Mouffe, kita saat ini berada dalam ruang hegemonik yang terbuka. Gerakan Demokrasi yang dimulai sejak Revolusi Perancis pada Abad ke-18, telah melahirkan Impian demokratis (*Democratic Imaginary*), yang terus berkembang dari masa ke masa.

Pada periode awal, *democratic imaginary* tersebut berhasil menumbangkan kediktatoran Louis XIV dan memulai sistem republik modern. Namun, pada kesempatan lain, *democratic imaginary* juga melahirkan diktator sekelas Hitler dengan reputasi pembantaian yang mengerikan, sekaligus manuver perang dunia yang menghancurkan.

Di Indonesia, ruang hegemoni juga terus bergeser. Reformasi 1998 didorong oleh impian kolektif untuk mengakhiri rezim Orde Baru yang totaliter dan tertutup, menggantinya dengan pemerintahan baru yang lebih demokratis dan terbuka. Sayangnya, keterbukaan era reformasi juga dimanfaatkan oleh ideologi-ideologi radikal dan transnasional untuk melakukan penetrasi terhadap ajaran-ajaran dan keyakinan beragama.

Semua itu menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang terbuka bagi setiap kontestasi gagasan, ideologi, keyakinan maupun kekuatan politik. Bahkan, ideologi yang anti demokrasi sekalipun bisa tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang demokratis, seperti kasus Hittler di Jerman dan ideologi radikal di Indonesia pasca Reformasi.

Di sinilah kita dituntut untuk merumuskan kesepahaman kolektif, guna menghadang dan menandingi penetrasi ideologi-ideologi radikal. Moderasi Beragama adalah Impian demokratis kita, bersama seluruh warga dunia, karena faham inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dan dunia dari kehancuran ekstrem. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk menempatkan moderasi beragama agar menghegemoni setiap ruang publik.

Meskipun begitu, pengarusutamaan moderasi beragama tetap harus dilakukan secara terorganisir dan terukur. Di satu sisi, gerakan ini harus tegas dan persisten terhadap setiap pandangan dan tindakan radikal-intoleran. Di sisi lain, kita juga harus simpatik dan edukatif untuk menyadarkan masyarakat yang belum memahami pentingnya moderasi beragama.

Pelanggaran hak-hak beragama yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok radikal-intoleran harus dikutuk dan ditindak sekeras-kerasnya. Segenap aktivis dari semua agama

harus bahu-membahu, saling dukung menyuarkan sanksi sosial terhadap pelaku, agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Di sisi lain, ketika terjadi sikap intoleran yang bersifat insidental, sporadis dan dipengaruhi ketidaktahuan, diperlukan respon yang lebih seimbang. Tindakan intoleran tersebut harus tetap dikecam sebagai perilaku yang tidak tepat, tapi juga diperlukan pendekatan personal untuk melakukan edukasi dan penyadaran terhadap pelaku, agar menyadari kekeliruannya.

Dan guna meminimalisasi ketidakpahaman publik tentang pentingnya moderasi beragama, sudah tentu dialog-dialog bertema moderasi dan toleransi harus dibuka seluas-luasnya. Kuliah umum, seminar, *workshop* bertema moderasi beragama perlu dilakukan secara rutin dan mendalam. Para pegiat gerakan moderasi juga bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyusun pelajaran tambahan bagi siswa terkait pengenalan moderasi beragama.

Membumikan Gerakan Moderasi

Jika merujuk berbagai temuan riset, dapat disimpulkan bahwa bahwa mayoritas warga Indonesia cenderung toleran dalam beragama, dan hanya sebagian kecil yang cenderung intoleran. Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis April 2021 misalnya, menemukan bahwa 15.1% Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan jika atasannya berbeda agama. Artinya, sikap intoleran tersebut kurang dari seperlima jika dibandingkan ASN yang tidak keberatan dipimpin oleh orang berbeda agama.

Oleh karena itu, berbagai dialog harus diintensifkan agar mayoritas pemeluk agama di Indonesia yang toleran, tidak terpengaruh oleh minoritas intoleran. Dialog juga harus memberi

bekal wawasan, argumen, serta motivasi bagi mayoritas toleran agar berani bersuara ketika menemui tindakan-tindakan intoleran di sekitarnya.

Guna memupuk motivasi sikap moderat dan toleran tersebut, kanal-kanal komunikasi harus dibangun di semua level. Warga yang menjadi korban dari tindakan intoleran harus dijamin memiliki akses untuk menyuarakan atau mengadukan perilaku diskriminatif yang dialami. Para aktivis moderasi juga harus memberi dukungan solidaritas secara massif bagi setiap korban diskriminasi dan intoleransi.

Komunikasi dan solidaritas gerakan moderasi tersebut juga perlu dikonsolidasikan secara solid dan sistematis. Kanal-kanal virtual maupun konsolidasi terbuka harus melibatkan seluruh pegiat moderasi lintas agama. Agenda konsolidasi juga bisa memanfaatkan ruang-ruang publik yang sudah tersedia, seperti tempat ibadah hingga pertemuan- pertemuan tingkat RT/RW untuk terus menjaga semangat moderasi beragama.

Para tokoh dan aparat juga perlu dipastikan untuk menjadi bagian dari gerakan moderasi. Kepala Desa hingga ketua RT yang belum paham pentingnya moderasi beragama, perlu didekati dan diajak berdialog secara edukatif agar memahami pentingnya toleransi dan moderasi. Di sisi lain, berbagai prosedur kontestasi publik dari level nasional hingga komunitas harus memasukkan syarat moderasi bagi para kandidat.

Calon presiden, calon legislatif, calon ketua organisasi, hingga calon kepala desa maupun ketua RT perlu diprioritaskan pada sosok-sosok yang toleran dan moderat. Para pegiat gerakan moderasi harus memiliki penetrasi yang menjangkau berbagai level ruang publik tersebut. Dengan begitu, moderasi beragama

yang kita cita-citakan bersama akan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, dan tendensi radikal-intoleran akan kehilangan ruang untuk tumbuh dan berkembang.

Persatuan sebagai Syarat Mutlak Kemajuan

SDM unggul dan kemajuan yang kita cita-citakan hanya akan terbentuk dan tercapai, jika kita melewati syarat dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara, yaitu persatuan. Mengutip Laclau & Mouffe, sebuah persatuan hanya akan tercapai jika ada pengakuan terhadap perbedaan.

Tentu saja, pengakuan terhadap perbedaan itu hanya bisa terjadi jika kita menganut faham moderat, dan tidak mungkin dilakukan oleh kaum radikal dan intoleran. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah syarat mutlak bagi terbentuknya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dan persatuan tersebut menjadi fondasi pokok bagi terbentuknya SDM unggul dan tercapainya Indonesia Maju.

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara majemuk dengan keberagaman agama maupun budaya. Keberagaman tersebut harus terus kita jaga dan lestarikan. Kemerdekaan berkeyakinan harus dijamin dan ditradisikan dengan sikap saling menghormati. Kekayaan budaya dan kearifan lokal juga harus dijaga dan dilestarikan. Dan semua itu hanya bisa dilakukan jika kita menganut paham keagamaan yang moderat. Maka, membumikan tradisi moderasi adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan kita dalam hidup beragama dan berbangsa, sekaligus menjamin keberlanjutan umat manusia.

Saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini, bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para Sarjana yang diwisuda hari ini di IAHN Gde Pudja Mataram.





04

Menjadi Manusia Tatwa

Menjadi Manusia Tatwa¹⁶⁾

Tema *Manusia Tattwa* penting untuk diangkat kembali, berpijak dari pandangan manusia sebagai pusat. Hal ini diangkat oleh Ida Bagus Made Dharma Palguna dalam karyanya “Manusia Tattwa”. Manusia dibicarakan secara mendalam, dari luar sampai dalam. Seutuhnya. Dari manusia, segala sesuatu bisa berawal, dan juga sekaligus bisa membuat semuanya berakhir. Manusia adalah pusat arah. Sebab manusia adalah pusat, maka segala sesuatu mengada darinya dan meniadakan kepadanya.

Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat akademik, saya selalu mengatakan bahwa ketika perkembangan sains dan teknologi mulai kehilangan jejak dalam memahami manusia dan kemanusiaannya, mulai kita lepas kendali. Hal ini membuat kita berada dalam kondisi seperti Juggernaut, kereta besar yang rem-nya blong sehingga kehilangan kontrol yang merusak dan menghancurkan apa yang dilaluinya.

¹⁶⁾ Disampaikan pada Dies Natalis XXVII Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta, 24 Oktober 2021.

Karena itu, setiap proses pendidikan tidak boleh melupakan manusia dan kemanusiaan. Kita sedang mendidik manusia dengan kompleksitasnya. Untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bukan hanya menguasai sains dan teknologi, tapi juga menjadikan pengetahuan mewujud dalam tubuhnya menjadi *Śāstra Paraga*.

Itulah sebabnya, saya berpandangan bahwa dalam era disrupsi, kita tidak hanya membutuhkan budaya literasi, tapi melanjutkan budaya literasi menjadi budaya etik, sehingga sastra betul-betul membadan dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Dari *śāstra paraga*, kita perlu melanjutkan perjalanan menjadi *śāstra-dṛṣṭa*, di mana sastra atau pengetahuan bisa dijadikan “bantang” dalam menyelesaikan persoalan hidup bersama bahkan dalam proses pengambilan keputusan. Inilah yang dikenal dalam teori-teori kekinian sebagai *knowledge based policy*.

Gelombang Disrupsi

Saya menaruh harapan besar pada perguruan tinggi Hindu dalam meletakkan dasar bagi terwujudnya manusia tattwa. Meskipun STAH DNJ baru berumur 27 tahun. Tetapi, usia muda justru sebuah kesempatan untuk bergerak lebih lincah dalam menyongsong masa depan.

Perkenankan saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi, bahwa saat ini adalah momentum bagi Perguruan Tinggi untuk menyesuaikan relevansinya. Perguruan Tinggi yang usianya sudah tua harus meremajakan kurikulum, manajemen dan perilaku agar tetap tangguh dan kompetitif. Dan bagi Perguruan Tinggi yang masih muda, ada kesempatan emas untuk melompat tanpa beban, membuang tradisi kerja masa lalu dan menerapkan

cara-cara kerja baru, kurikulum baru dan manajemen model baru dalam merespon gelombang disrupsi.

Revolusi Industri 4.0 telah merombak lanskap ekonomi, sosial-budaya hingga politik kontemporer. Teknologi digital dan otomatisasi mengubah berbagai akses informasi, pola interaksi, model komunikasi, tren gaya hidup, hingga cara kita bekerja dan mengambil keputusan. *Cloud computing, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Advance Robotic, Virtual Reality*, semua itu menggerakkan disrupsi di segala bidang. Perdagangan bergeser menjadi *e-commerce*; perbankan terdisrupsi oleh *fintech* dan *e-payment*; kedokteran dan farmasi terdisrupsi *health-tech*; profesional hukum diguncang oleh *reg-tech*; bahkan dunia Pendidikan pun ditantang oleh *edu-tech*.

Di saat yang sama, pandemi Covid-19 memaksa masyarakat lapisan atas hingga lapisan bawah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, demi meminimalisasi sebaran Covid-19. Interaksi tatap muka diganti interaksi jarak jauh, mulai dari *Work from Home, virtual meeting, webinar, Sekolah Jarak Jauh, telemedicine*, hingga konser virtual. Fitur *big data*, geolokasi hingga *real-time software* pun makin penting untuk pengendalian pandemi.

Rangkaian Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19 tersebut kian mempertegas bahwa gelombang disrupsi sangatlah mendesak dan tak bisa ditawar-tawar. Banyak pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting, kini menjadi usang dan tidak lagi relevan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan, diperkirakan punah, tergusur oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Profesi akuntan, diperkirakan akan diganti *software* yang membukukan dan melaporkan data secara real time. Profesi

penerjemah akan digeser aplikasi translator, dengan kemampuan interpretasi yang makin akurat dan presisi. *Driver* dan pilot akan diganti teknologi otomatisasi yang mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan, media penyiaran di beberapa negara mulai menguji coba robot pintar untuk menjadi presenter televisi.

Meskipun begitu, disrupsi tidak hanya merombak tatanan dan kemapanan lama, tapi juga melahirkan dan membangun tatanan baru. *Emerging skills and knowledge* terus bermunculan, seiring temuan-temuan inovatif para peneliti maupun praktisi, yang juga melahirkan berbagai *emerging jobs*. Manajer data, kurator digital, operator *self-driving vehicles*, adalah sedikit di antara pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan di masa depan.

PR besar kita yaitu mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut Revolusi Industri 4.0 sehingga Indonesia tidak tergulung dan tenggelam oleh gelombang disrupsi. Sebaliknya, kita bisa berselancar menyiasati gelombang untuk menuju arah yang ingin kita tuju bersama.

Inovasi dan Perubahan

Jika menengok ke belakang, kita akan melihat bahwa peradaban manusia adalah proses panjang inovasi, disrupsi dan perubahan. Kurang lebih 200 ribu tahun lalu, homo sapiens, nenek moyang manusia masih sangat primitif, hidup nomaden sambil berburu dan meramu makanan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, sampai mereka menemukan inovasi budidaya tanaman dan binatang.

Dengan inovasi tersebut, umat manusia mulai menetap dan membangun corak masyarakat agraris. Tiap pemukiman

mulai mengembangkan tatanan, norma-norma dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yang sederhana, hingga berkembang menjadi kerajaan, suku dan bangsa-bangsa. Bisa dikatakan, periode ini adalah fondasi dari masyarakat hari ini.

Pada abad ke-18, masyarakat agraris mulai terdisrupsi oleh penemuan mesin uap yang melahirkan pabrik-pabrik hingga kereta api. Inovasi ini sekaligus memulai corak masyarakat industri, di mana berbagai pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan binatang, mulai digantikan mesin. Fase industrial ini berkembang sangat cepat, melahirkan energi listrik, digitalisasi bahkan otomatisasi, hingga saat ini memicu gelombang industri 4.0.

Dari rangkaian panjang evolusi masyarakat di atas, kita bisa menggarisbawahi bahwa disrupsi dan inovasi adalah bagian dari proses peradaban. Peradaban kita terbentuk oleh akumulasi pengetahuan dan pengalaman, yang diwariskan dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses peradaban tersebut menggambarkan upaya manusia untuk melepas ketergantungan terhadap alam, dan justru mengembangkan kemampuan untuk mengubah dan mempengaruhi alam. Dan akhirnya, umat manusia pun membuat demarkasi dengan alam, mengidentifikasi diri sebagai spesies yang berbeda dengan semua makhluk dan entitas lain di muka bumi.

Secara khusus, Sosiolog Gerhard E. Lenski menekankan bahwa teknologi berperan penting mendorong perubahan sosial. Menurutnya, masyarakat dengan teknologi sederhana cenderung berubah secara lambat. Dan sebaliknya, masyarakat yang mengadopsi teknologi maju cenderung mengalami perubahan lebih cepat. Pandangan Lenski tersebut juga terlihat dalam

alur perubahan corak masyarakat di atas, di mana masyarakat nomaden membutuhkan ratusan ribu tahun untuk menuju masyarakat agraris. Masyarakat agraris membutuhkan ribuan tahun untuk menjadi masyarakat industrial, dan masyarakat industri hanya butuh beberapa ratus tahun untuk menuju industri 4.0 saat ini.

Dan mungkin, kita akan menempuh waktu lebih pendek untuk bertransformasi menuju corak masyarakat berikutnya. Ini semua menyiratkan pesan penting, bahwa generasi kita harus terlatih untuk beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat.

Pendidikan sebagai Penyelaras Perubahan

Tidak bisa pungkiri, bahwa teknologi cenderung berkembang lebih cepat dari kesadaran masyarakat. William F. Ogburn menggunakan istilah *cultural lag* atau ketertinggalan budaya untuk menggambarkan kegagalan seseorang menghadapi lanskap sosial di sekelilingnya. Salah satu penyebabnya, yaitu keterlambatan beradaptasi dengan inovasi yang tengah berkembang.

Cultural lag hampir selalu terjadi di setiap fase perubahan, sehingga perlu upaya ekstra untuk menyelaraskan perkembangan inovasi dengan kesadaran masyarakat. Dan salah satu institusi yang berperan penting dalam penyelarasan budaya, yaitu pendidikan. Melalui fungsi sosialisasinya, institusi pendidikan melakukan sinkronisasi antara perkembangan budaya dan kesadaran individu. Fungsi ini terus berjalan dari masa ke masa.

Pada masyarakat Yunani kuno ada tradisi *Skhole*, di mana para ahli mengajarkan berbagai norma, cara berpikir dan keterampilan untuk anak-anak dan para remaja. Pada

masyarakat agraris, mayoritas proses pendidikan dijalankan institusi keluarga, yang mengajarkan sosialisasi budaya, integrasi sosial, hingga berbagai keterampilan hidup. Selain itu, dikenal juga institusi-institusi pendidikan lokal seperti pesantren, padepokan, dan sebagainya.

Adapun insituti pendidikan kita saat ini adalah produk dari era industrialisasi yang berlangsung pada kisaran abad ke- 18 hingga 19. Pengoperasian pabrik dan birokrasi modern membutuhkan sumber daya besar yang menguasai permesinan, kemampuan baca tulis, hingga adaptasi kultur modern.

Persoalannya, modernisasi sendiri berkembang sangat cepat. Hari ini, kita mendapati lanskap masyarakat sudah jauh berbeda dibanding lanskap pada saat James Watt menemukan mesin uap 3.5 abad lalu. Lanskap masyarakat hari ini juga sangat berbeda dibanding abad ke-19, ketika format pendidikan modern disusun dan dikembangkan.

Daniel Bell menggunakan istilah masyarakat Post-Industri untuk menggambarkan peralihan paruh kedua abad ke- 20, di mana sektor jasa berkembang sangat pesat, dan volume ekonominya mulai menggeser sektor industri. Perimbangan sektoral tersebut juga disertai perubahan kultur kerja, tren pengetahuan dan teknologi, hingga cara-cara pengambilan keputusan. Saat ini, gambaran Bell tersebut terlihat semakin nyata seiring revolusi industri 4.0 yang mengubah ruang kerja maupun lanskap ekonomi dari terpusat menjadi terpecah, didukung penggunaan piranti digital.

Pertanyaannya, apakah model pendidikan kita yang didesain pada periode awal industri, masih relevan di tengah berbagai perubahan saat ini?

Kampus Merdeka

Marshall McLuhan (1957) menyebut bahwa perkembangan teknologi akan menciptakan “kelas-kelas tanpa tembok” (*classrooms without walls*). Pandangan tersebut terinspirasi perkembangan teknologi informasi saat itu, di mana televisi dan radio menjadi media yang sarat pengetahuan, sehingga para audiens bisa mengakses ilmu tanpa harus masuk sekolah atau kampus.

Jika McLuhan masih ada, tentu dia semakin bersemangat dengan pandangannya, karena teknologi internet saat ini menawarkan akses informasi dan pengetahuan yang jauh lebih massif, interaktif, dan variatif. Melalui berbagai kanal daring, para pakar dan praktisi kredibel bisa mengunggah ilmu dan pengalaman yang berharga, dan netizen pun bisa mengunduh ilmu dari siapa saja, di mana saja, sesuai kebutuhan masa depan mereka.

Di saat yang sama, institusi Pendidikan kita menghadapi tantangan mendasar, yaitu banyaknya pengetahuan dan keterampilan baru yang belum terakomodasi oleh kurikulum dan program studi. Semua itu menyiratkan bahwa model pendidikan yang didesain dengan program lama ini perlu di-*upgrade*, agar kompatibel dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, sehingga mampu memfasilitasi penguasaan *emerging knowledge* dan *emerging skills*.

Atas pertimbangan itulah, pemerintah meluncurkan Program Merdeka Belajar, yang di dalamnya ada episode Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan manifestasi upaya untuk menyesuaikan langgam pendidikan kita di tengah gelombang disrupsi yang berlangsung. Dengan begitu, pendidikan kita lebih *up to date* dengan tuntutan zaman, dan para mahasiswa

pun lebih adaptif, tidak mengalami *cultural lag* dalam proses perubahan.

Esensi Kampus Merdeka sendiri yaitu memberi kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Talenta mereka tidak boleh dipagari terlalu ketat dengan disiplin ilmu yang kaku, mengingat hampir semua profesi masa depan membutuhkan *hybrid knowledge* dan *hybrid skill*. Untuk itu, mahasiswa S1 bisa menempuh 3 semester di luar Prodi, mencakup 1 semester kuliah di prodi lain dan 2 semester kuliah di luar kampus.

Sesi kuliah di luar kampus bisa berupa magang, proyek desa, praktik mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, hingga bela negara. Program-program tersebut akan membiasakan mahasiswa untuk belajar dan berkarya di lingkungan heterogen, menghadapi persoalan riil yang kompleks, dan dituntut memecahkannya secara *smart* dan *adaptive*.

Di saat yang sama, ekosistem perguruan tinggi juga harus dibanahi. Dunia kampus yang eksklusif harus membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan berbagai institusi kredibel, baik dunia industri, organisasi profesi hingga lembaga nirlaba. Mereka bisa diundang untuk merumuskan kurikulum dan pembelajaran bersama, menjadikan kampus sebagai panggung kolaborasi antar*stakeholder*, bukan menara gading yang terasing dari realitas.

Ruang-ruang kampus bisa dibuka menjadi *tenant* kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, dunia akademis, dunia usaha, komunitas dan media. Pada akhirnya, para *stakeholder* tersebut juga akan membantu mahasiswa melanjutkan kiprahnya usai menempuh pendidikan. Dengan begitu, kampus

akan menjadi inkubator bagi alumni-alumni yang siap berinovasi sesuai jalur dan profesi yang dipilih.

Merawat Kemanusiaan

Tokoh aliran Frankfurt, Juergen Habermas menyebut bahwa manusia memiliki tiga unsur kepentingan, mencakup kepentingan teknis, kepentingan praktis, dan kepentingan emansipatoris. Kepentingan teknis yaitu etos untuk mengatasi berbagai batasan alam, yang melahirkan rumpun ilmu eksak. Kepentingan praktis yaitu etos menjalin kesepahaman antarmanusia, yang melahirkan ilmu humaniora. Dan kepentingan emansipatoris yaitu dorongan mencapai keadilan dan kemanusiaan, yang melahirkan tradisi kritis.

Tiga kategori kepentingan tersebut bisa kita rujuk untuk mendesain model pendidikan, dengan menyiapkan tiga fondasi pembelajaran. Fondasi teknis membekali keterampilan dan kapasitas untuk berinovasi dan menciptakan terobosan baru. Fondasi praktis membekali kapasitas adaptasi, sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri di setiap lingkungan dan proses perubahan. Dan fondasi emansipatoris akan membentuk kepribadian yang menjunjung nilai-nilai luhur, keadilan dan kemanusiaan.

Dengan mengadopsi tiga fondasi tersebut, saya ingin menekankan bahwa di tengah disrupsi dan perubahan yang begitu cepat, kita harus tetap merawat nilai-nilai luhur dan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, saya menyarankan STAH DNJ menempatkan diri sebagai kampus yang memprioritaskan fondasi emansipatoris dalam proses pembelajaran, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur dan kemanusiaan.

Selaras dengan implementasi Kampus Merdeka, prioritas tersebut bisa diterapkan dalam beberapa program.

Pertama, program membangun desa yang diprioritaskan ke kawasan 3T. Dalam program ini, para mahasiswa bisa praktik mengajar dan penyuluhan, sembari berdinamika dengan warga. Bukan sekedar praktikum akademik, tapi mahasiswa juga harus turut mengurai berbagai masalah seperti kemiskinan, kesehatan, lingkungan, pembangunan desa, dan sebagainya.

Kedua, program penguatan toleransi dan moderasi beragama. Pada program ini, para mahasiswa bisa menjalani pembelajaran bersama pesantren, sekolah teologi dan institusi-institusi agama lain, sembari memperkuat pertukaran budaya. Pembelajaran lintas agama ini juga bisa menjembatani dialog antarkeyakinan yang akan memperkokoh fondasi kebangsaan dan kemanusiaan.

Ketiga, mahasiswa juga bisa difasilitasi untuk terlibat dalam berbagai program kemanusiaan. Bencana alam, penanganan imigran, pandemi, semua membutuhkan kerelawanan. Kampus bisa menjajaki kerja sama dengan United Nations, BNPB, Satgas Covid-19, dan sebagainya. Mahasiswa yang terlibat di program ini diharap semakin peka dengan masalah kemanusiaan, dan kian terasah dengan pemahaman dan pembelajaran lapangan.

Keempat, konservasi warisan budaya. Sebagai agama yang beririsan dengan sejarah Nusantara, Hindu memiliki peninggalan sejarah yang berlimpah, seperti candi, lontar, dan berbagai artefak yang memuat narasi penting masa lalu Indonesia dan Hindu di Nusantara. Mahasiswa STAH DNJ bisa difasiltiasi untuk magang bersama Balai Pelestarian Budaya, museum, badan pengelola candi dan turut serta melestarikan warisan budaya tersebut.

Kelima, konservasi lingkungan hidup. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan dan berbagai kemudahan bagi manusia. Namun di saat yang sama, eksploitasi alam tanpa terkendali juga mengancam masa depan generasi penerus. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk dilibatkan dalam berbagai upaya konservasi lingkungan, guna menjamin ketersediaan sumber daya dan penghidupan yang berkelanjutan.

Menjadi Manusia Seutuhnya

Di luar prioritas program di atas, tentu saja STAH DNJ harus tetap memperkuat pembelajaran *skill* dan kapasitas adaptasi bagi mahasiswa. Prioritas di atas lebih bersifat *institutional branding* guna membangun kekhasan STAH DNJ. Dalam pelaksanaannya, program prioritas tersebut juga perlu diiringi kajian ilmiah yang bisa diselaraskan dengan topik keagamaan; moderasi; akulturasi Hindu; kearifan lokal; sejarah Hindu setempat; dan sebagainya.

Kajian-kajian tersebut bisa dikelola dalam kanal *online* atau perpustakaan digital, untuk menjadi rujukan bagi kajian Hindu di Indonesia. Tentu saja, kajian dan dokumentasi digital tersebut membutuhkan SDM yang menguasai metode riset, *skill* dokumentasi, komunikasi visual, hingga pengelolaan data digital. Untuk memperkenalkan kanal tersebut, juga butuh SDM yang menguasai *skill* wirausaha dan pemasaran. Berbagai kebutuhan SDM ini juga bisa difasilitasi program penguatan *skill* dan wawasan digital, seiring implementasi Kampus Merdeka.

Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Hindu di Kawasan Ibu Kota, saya percaya STAH DNJ memiliki kapasitas untuk merealisasikan berbagai gagasan tersebut. Usia 27 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membuktikan bahwa STAH DNJ mampu mempertahankan eksistensinya. Meskipun begitu,

usia 27 tahun juga bukan alasan untuk berpuas diri, mengingat masih banyak tugas yang harus dikawal ke depan.

Saya berharap STAH DNJ akan terus tumbuh menjadi Kampus Merdeka, penetas insan-insan berdikari yang mampu menentukan masa depannya. Dan saya juga berharap, para alumni STAH DNJ akan menjadi manusia-manusia utuh, yang memiliki kemampuan inovasi, kapasitas adaptasi, wawasan budaya, visi kemanusiaan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai disini saja. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini, bisa bermanfaat bagi para Sujana di STAH DNJ.





05

Aktualisasi Ilmu dan Amal

Aktualisasi Ilmu dan Amal¹⁷⁾

Saya merasa sangat terhormat diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada rangkaian Wisuda Pascasarjana ke-13 dan Wisuda Sarjana ke-15, di kampus yang telah mengabadikan sosok pejuang kemerdekaan yang *nindihin Gumi Bali, nindihin gumi Nusantara* sebagai nama universitas, yakni di Universitas Ngurah Rai.

Dengan menyandang nama besar pahlawan nasional, tentu kita semua berharap, bahwa Universitas Ngurah Rai akan selalu melahirkan sarjana-sarjana pejuang yang tidak hanya mengantongi ijazah akademis, tapi juga memiliki jiwa kejuangan untuk mengamalkan ilmunya dalam selampah kehidupannya sehari-hari.

Pada tanggal 15 September tahun 1951, Bung Karno pernah menyampaikan sebuah pidato yang bersejarah saat menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Dalam pidato tersebut, beliau

¹⁷⁾ Disampaikan pada Wisuda Pascasarjana XIII dan Sarjana XI Universitas Ngurah Rai, Denpasar, 24 Oktober 2022.

menegaskan bahwa ilmu pengetahuan hanya berharga penuh jika dihubungkan dengan amal perbuatan, untuk mengabdikan pada praktik hidup manusia dan bangsa.

Ilmu, Kebajikan dan Amal

Berkaca pada pidato tersebut, kita merasa diingatkan bahwa pembangunan generasi yang unggul juga harus diiringi upaya menyambung antara: ilmu, kebajikan, dan amal. Dua hari yang lalu, bertepatan dengan Saniscara Umanis, Wuku Watugunung, umat Hindu merayakan hari suci Saraswati, hari *pewedalan* Sang Hyang Aji Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianugerahkan oleh Sang Hyang Widhi Wasa kepada seluruh umat manusia di dunia untuk melenyapkan kebodohan. Dengan lenyapnya Avidya atau kebodohan, manusia menjadi cerdas dan bijaksana.

Dalam ortodoksi dan juga ortopraxis agama Hindu di Bali, rangkaian hari suci Saraswati dimulai dari Redite Kliwon Wuku Watugunung atau sering disebut dengan Watugunung Runtuh. Pada hari Watugunung Runtuh, kita diingatkan agar sebelum menerima ilmu pengetahuan kita harus menghilangkan ego di dalam diri agar dapat menjadi bijaksana. Keangkuhan sang pembelajar harus bisa ditekan atau dikendalikan, ego Watugunung harus diruntuhkan sehingga terciptalah keharmonisan dan keserasian hubungan dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya di hari Senin, Soma Umanis Watugunung, dikenal dengan hari Sandung Watang, yang diartikan sosok mayat, yang mana mayat juga disebut maya yang berarti ketidaksadaran atau ketidakberpengetahuan. Oleh karena itu maya sedapat mungkin dihilangkan dalam menerima ilmu pengetahuan. Pada

hari Selasa, Anggara Paing Watugunung, disebut Paid-Paidan, yang bermakna, unsur maya berpotensi menggagalkan sang pembelajar untuk menerima ilmu.

Di hari Rabu, Budha Pon Watugunung yang disebut Buda Urip, Watugunung dihidupkan kembali. Maknanya yaitu kebangkitan kesadaran buddhi dalam diri manusia untuk menerima ilmu. Dilanjutkan dengan Pategtegan yang jatuh di hari Kamis, Wraspati Wage Watugunung yang memberi kesempatan untuk perenungan batin secara mendalam untuk mencapai ketetapan hati setelah buddhi telah bangkit dan hidup saat Buda Urip.

Dan pada hari jumat, Sukra Kliwon Watugunung disebut Pangredanan. Di sini Watugunung menyembah Ida Bethara Siwa. Ida Bhatara Siwa juga disebut Bhatara Guru, guru dari semua guru. Jadi ini bagaimana sikap kita menghormati seorang guru. Dan semua rangkaian bermuara pada puncaknya yaitu Hari Raya Saraswati.

Setelah hari suci Saraswati, seiring pergantian wuku dari wuku watugunung ke wuku Sinta, juga ada rangkaian hari suci yang memiliki makna yang sangat dalam. Sehari setelah hari suci Saraswati, kita merayakan Banyu Pinaruh yang dimaknai sebagai proses penyucian diri, bermandikan ilmu pengetahuan.

Pada hari ini, tepat saat hari wisuda, *Soma Pon Sinta*, dikenal dengan Soma Ribek, dimaknai sebagai pemujaan pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi sebagai Ratu Gede Manik Galih atau Ida Bhatari Sri Amerta. Soma Ribek dimaknai sebagai hari penuh karunia *urip* atau *amertha*. Soma Ribek menjadi pengingat agar ilmu pengetahuan digunakan dengan bijak, sesuai dharma untuk kemakmuran.

Semoga di hari baik ini, para wisudawan dengan keluarga juga diberikan anugerah karunia amertha. Dilanjutkan pada besok, *Anggara Wage Sinta* dinamakan *Sabuh Mas*, yang bermakna dengan berbekal ilmu pengetahuan berupaya dapat meningkatkan kualitas manusia melalui pemenuhan kebutuhan hidup, pangan, sandang, dan papan sebagai harta kekayaan atau Sabuh Mas.

Rangkaian Hari Saraswati di akhiri pada *Buda Kliwon Sinta* yang diperingati sebagai hari raya Pagerwesi. Hari Pagerwesi bermakna apapun yang diraih melalui ilmu pengetahuan harus bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik ibarat pagar besi agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Pada hari raya Pagerwesi memuja Sang Hyang Pramesti Guru (Guru Yang Agung). Hasil-hasil yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan dipersembahkan kepada sang Guru melalui ajaran Catur Guru.

Melalui rangkaian hari-hari suci mulai dari Watugunung Runtuh, Saraswati sampai dengan Pagerwesi, para leluhur kita di Bali selalu mengingatkan melalui rerainan jagat itu, tentang proses memperoleh ilmu pengetahuan yang menekan ego-kesombongan diri, dan bagaimana ilmu pengetahuan yang diperoleh itu harus bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan diri dan juga masyarakat. Itulah sebabnya *śāstra* harus *paraga*, *śāstra* harus *wadi*, ilmu pengetahuan harus *diurip*, dihidupkan, diamalkan dalam perilaksana, *prakerti* kita dalam kehidupan.

Ida Bhatara Kawitan dalam berbagai susastra juga menekankan bahwa turunnya pengetahuan bukan semata-mata *transfer of knowledge*, tapi sesungguhnya *transfer of values* dan *virtues* untuk mencapai *Wiweka-widyā* dan *Jñāna-wicakṣaṇa*. Proses pendidikan bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang

menghasilkan *widyā*, tapi juga menembus olah kepekaan *jñāna* hingga berpuncak pada *kawicakṣaṇan* atau wisdom.

Kewicaksanaan sangat penting dalam pencapaian para pembelajar manusia Bali. Kita memang perlu SDM yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Akan tetapi, itu tidak cukup karena harus dilanjutkan dengan mendapatkan SDM yang mampu mengamalkan ilmunya dengan rasa kepedulian sosial yang tinggi, terasah kepekaan *jñāna*-nya dan yang utama, mengedepankan kebijaksanaan dalam salampah lakunya.

Ilmu sebagai Energi Perjuangan

Sulit memungkiri, bahwa perkembangan suatu masyarakat dan peradabannya sangat dipengaruhi ilmu pengetahuan. Gerakan kemerdekaan Indonesia juga berjalan cepat seiring munculnya golongan Bumi Putera terpelajar. Spektrum pengetahuan membuat para founding fathers menyadari pentingnya sinergi kebangsaan untuk mengubah perjuangan-perjuangan lokal dan primordial menjadi perjuangan nasional.

Meskipun begitu, akselerasi gerakan nasional tersebut tidak terjadi secara instan. Bung Karno ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda, lantaran aktivitas politiknya dianggap berbahaya. Semua itu tidak menyurutkan tekad dan semangatnya untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Baginya, perjuangan adalah bentuk pengamalan dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dan Bung Karno tidak sendirian. Sederet kaum terpelajar juga sejalan dengan pandangan dan sikapnya.

Bung Hatta, Sutan Sahrir, Sayuti Melik adalah sedikit di antara kaum terpelajar yang juga menentang keras pemerintahan

kolonial. Akibatnya, mereka pun diasingkan ke Boven Digoel. Dan sama seperti Bung karno, mereka tidak surut dengan perjuangannya. Ilmu yang mereka pelajari membuahkan kesadaran politik untuk menentang kolonialisme, meski harus meringkuk di penjara dan pembuangan.

Di sisi lain, kita juga melihat upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan secara gagah berani dengan perjuangan bersenjata. I Gusti Ngurah Rai adalah satu teladan perjuangan dari Bali, yang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap itu tergambar jelas dalam suratnya kepada Overste Termeulen tahun 1946, yang menolak tawaran untuk berunding.

Ngurah Rai menegaskan bahwa urusannya adalah persoalan keamanan di Bali yang terancam oleh tentara Belanda. Dan rakyat pun waktu itu hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, walau mereka harus *puputan*, bertempur habis-habisan. Ngurah Rai juga menegaskan dirinya bukan orang yang kompromis, dan sudah mendelegasikan proses perundingan pada perjuangan diplomasi di Jawa.

Sekilas fase perjuangan kemerdekaan di atas memberi gambaran kepada kita, bahwa sinergi antara ilmu dan amal telah menghasilkan energi kebangsaan yang sangat besar, terlihat pada komitmen kaum terpelajar yang kuat untuk mengamalkan ilmunya dalam gerakan politik kemerdekaan.

Kisah para pejuang kemerdekaan di atas menegaskan bahwa ada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang harus diutamakan. Bung Karno telah mencontohkan komitmennya meninggalkan zona nyaman kelas terpelajar, bahkan rela

diasingkan demi idealisme kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai juga memberikan keteladannya, meninggalkan kenyamanan kehidupan puri, hingga gugur di medan perjuangan.

Mereka adalah inspirasi sekaligus teladan kita semua dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik pada hari ini maupun di masa-masa yang akan datang.

Tantangan yang harus kita hadapi saat ini pun berbeda dengan apa yang dihadapi oleh para pejuang. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat, seiring meningkatnya multilateralisme dan kompleksitas global. Kolonialisme dan penguasaan antarnegara, telah bergeser menjadi peperangan gaya baru; dalam wujud perang dagang dan kompetisi ekonomi yang sengit antarnegara. Di saat yang sama revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap ekonomi, sosial maupun politik dengan sangat cepat.

Negara di seluruh dunia berlomba-lomba melakukan adaptasi teknologi, membekali SDM hingga menyesuaikan ekosistemnya dengan tuntutan teknologi baru. Dalam situasi ini kita harus memiliki dua kemampuan yang sangat penting, yaitu kecepatan dan daya adaptasi. Jika kita beradaptasi dengan cepat, maka Indonesia berpeluang menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia.

Dalam mengawal transformasi digital, Indonesia saat ini sudah berhasil membidani dua decacorn dan Sembilan unicorn. Keberadaan mereka juga melibatkan 19 juta UMKM untuk memasuki ekosistem digital. Diperkirakan, pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 146 miliar USD, dan menjadi kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara.

Capaian tersebut akan mendukung lompatan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Seperti halnya perjuangan para pendiri bangsa, tentu saja upaya menuju kemajuan tersebut tidak bisa dicapai secara instan. Tapi kuncinya masih sama, yaitu aktualisasi ilmu dan amal.

SDM Indonesia harus membekali diri dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai kebutuhan zaman. Dan di saat yang sama, ekosistem harus dibangun untuk mendukung SDM kita mengamalkan ilmu-ilmunya. Lembaga pendidikan harus membenahi diri, menyesuaikan diri untuk mengakomodasi *emerging knowledge* dan *emerging skills*. Kurikulum, metode pengajaran, hingga ekosistem pembelajaran harus semakin inklusif, membuka diri untuk berkolaborasi dan mengakomodasi pengetahuan maupun ketrampilan baru.

Tentu saja SDM kita juga harus ditempa agar berkomitmen kuat dalam mangaktualisasikan ilmu dan amal demi kepentingan masyarakat, bangsa dan kemanusiaan yang lebih luas. Di sinilah, pendidikan karakter juga penting untuk terus diperkuat.

Menjadi Intelektual Organik

Perkenankan saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi, bahwa saat ini adalah momentum bagi Perguruan Tinggi untuk menyesuaikan relevansinya. Perguruan Tinggi yang usianya sudah tua harus meremajakan kurikulum, manajemen dan perilaku agar tetap tangguh dan kompetitif.

Dan bagi Perguruan Tinggi yang masih muda, ada kesempatan emas untuk melompat tanpa beban, membuang tradisi kerja masa lalu dan menerapkan cara-cara kerja baru, kurikulum baru dan manajemen model baru dalam merespon gelombang

disrupsi. Revolusi Industri 4.0 telah merombak lanskap ekonomi, sosial-budaya hingga politik kontemporer. Teknologi digital dan otomatisasi mengubah berbagai akses informasi, pola interaksi, model komunikasi, tren gaya hidup, hingga cara kita bekerja dan mengambil keputusan.

Cloud computing, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Advance Robotic, Virtual Reality, semua itu menggerakkan disrupsi di segala bidang. Perdagangan bergeser menjadi *e-commerce*; perbankan terdisrupsi oleh *fintech* dan *e-payment*; kedokteran dan farmasi terdisrupsi *health-tech*; profesional hukum diguncang oleh *reg-tech*; bahkan dunia Pendidikan pun ditantang oleh *edu-tech*.

Di saat yang sama, pandemi Covid-19 memaksa masyarakat lapisan atas hingga lapisan bawah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, demi meminimalisasi sebaran Covid-19. Interaksi tatap muka diganti interaksi jarak jauh, mulai dari *Work from Home, virtual meeting, webinar*, Sekolah Jarak Jauh, *telemedicine*, hingga konser virtual. Fitur *big data*, geolokasi hingga *real-time software* pun makin penting untuk pengendalian pandemi.

Rangkaian Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19 tersebut kian mempertegas bahwa gelombang disrupsi sangatlah mendesak dan tak bisa ditawar-tawar. Banyak pengetahuan dan ketrampilan yang dulu dianggap penting, kini menjadi usang dan tidak lagi relevan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan, diperkirakan akan punah, tergusur oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Profesi akuntan, diperkirakan akan diganti *software* yang membukukan dan melaporkan data secara *real time*. Profesi

penerjemah akan digeser aplikasi translator, dengan kemampuan interpretasi yang makin akurat dan presisi. Driver dan pilot akan diganti teknologi otomatisasi yang mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan, media penyiaran di beberapa negara mulai menguji coba robot pintar untuk menjadi presenter televisi.

Meskipun begitu, disrupsi tidak hanya merombak tatanan dan kemapanan lama, tapi juga melahirkan dan membangun tatanan baru. *Emerging skills and knowledge* terus bermunculan, seiring temuan-temuan inovatif para peneliti maupun praktisi, yang juga melahirkan berbagai *emerging jobs*. Manajer data, kurator digital, operator *self-driving vehicles*, adalah sedikit di antara pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan di masa depan.

PR besar kita yaitu mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut Revolusi Industri 4.0, sehingga Indonesia tidak tergulung dan tenggelam oleh gelombang disrupsi. Sebaliknya, kita bisa berselancar menyiasati gelombang untuk menuju arah yang ingin kita tuju bersama.

Untuk menyongsong era baru, tidak ada jalan lain, ekosistem perguruan tinggi juga harus dibenahi. Dunia kampus yang eksklusif harus membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan berbagai institusi kredibel, baik dunia industri, organisasi profesi hingga lembaga nirlaba. Mereka bisa diundang untuk merumuskan kurikulum dan pembelajaran bersama, menjadikan kampus sebagai panggung kolaborasi antarstakeholder, bukan menara gading yang terasing dari realitas.

Ruang-ruang kampus bisa dibuka menjadi *tenant* kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, dunia akademis, dunia usaha, komunitas dan media. Pada akhirnya, para *stakeholder*

tersebut juga akan membantu mahasiswa melanjutkan kiprahnya usai menempuh pendidikan. Dengan begitu, kampus akan menjadi inkubator bagi alumni-alumni yang siap berinovasi sesuai jalur dan profesi yang dipilih.

Dengan semangat kolaborasi, saya berharap Universitas Ngurah Rai harus tetap merawat nilai-nilai luhur budaya Bali dan semangat kejuangan yang diwarisi oleh I Gusti Ngurah Rai. Saya juga berharap, Universitas Ngurah Rai menempatkan diri sebagai kampus yang memprioritaskan fondasi emansipatoris dalam proses pembelajaran, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur budaya Bali, bergerak untuk konservasi alam dan budaya Bali dan tetap kokoh melanjutkan perjuangan para pahlwan agar nilai-nilai kejuangan tetap hidup dalam masyarakat Bali.

Universitas Ngurah Rai harus *napak pertiwi*, ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat Bali. Insan kampus harus tumbuh menjadi intelektual organik yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk melakukan perubahan, serta membentuk tatanan baru yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan begitu, kaum intelektual akan kaya pengalaman riil untuk melengkapi spektrum akademis. Dan sebaliknya, inovasi akademis yang mereka ramu akan menghasilkan solusi bagi persoalan-persoalan sosial yang mengemuka.

Belajar dan Berjuang Tanpa Henti

Terakhir, saya ingin menitipkan pesan bagi para wisudawan Sarjana maupun Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, yang hari ini di wisuda. Saudara-saudara hari ini, secara resmi telah menuntaskan satu tangga dalam kehidupan saudara. Maka hari-hari ke depan adalah fase untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat dari kampus.

Mungkin di antara peserta wisuda ada yang sudah banyak mengamalkan ilmunya sembari menjalani kuliah, maka ke depan dituntut untuk semakin optimal dalam mengamalkan ilmunya. Seperti pesan Bung Karno, bahwa ilmu pengetahuan adalah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh ilmu pengetahuan.

Tentu akan sangat membahagiakan jika ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah selama ini bisa bermafaat untuk orang banyak. Tapi jika itu belum bisa terwujud, setidaknya para wisudawan bisa berkomitmen untuk mengamalkan ilmu secara optimal sesuai konsentrasi akademik dan disiplin profesi masing-masing.

Dan yang tak kalah penting, kita semua harus terus melanjutkan proses pembelajaran. Pencarian ilmu pengetahuan adalah pencarian samudera tanpa tepi. Perubahan saat ini berjalan sangat cepat sehingga kita harus selalu mengupdate dan *mengupgrade* diri kita masing-masing.

Saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini, bisa bermanfaat bagi para Sarjana dan sujana di Universitas Ngurah Rai

Semoga para wisudawan Universitas Ngurah Rai bisa menjadi sarjana-sarjana pejuang yang tangguh dan teguh mempraktikkan ilmu menjadi amal-prakerti. Terus nyastra, mengamalkan ilmu pengetahuan bagi bentuk bhakti kita pada Ida Bhatara Guru dan para guru-guru kita semua.

Daftar Pustaka

- Bell, Daniel (1999). *The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Das, Subhendu (2019). Modern Science vs Vedic Science. *Vidyottama Sanatana, International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, Vol 3 No. 1 May 2019, hal 129-151
- Dhakidae, D (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dwipayana AAGN, *Kelas dan Kasta, Pergulatan Kelas Menengah Bali*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Dwipayana, AAGN, *GloBALism: Pegulatan Politik Representasi atas Bali*, Uluangkep, Denpasar, 2005.
- Freud, S. (1933). *Why War*. The Standard Edition of the Complete Pyscological Works of Sigmud Fred, Volume XXII 1932-1936.
- Fromm, Erich (2006). *The Art of Loving*. Jakarta: Fresh Book
- Fromm, Erich. Suzuki, DT. De Martino, Richard (1970). *Zen Buddhism and Psychoanalysis*. London: Novello & Company Ltd.
- Gramsci, A (1971). *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.
- Habermas, Jurgen (1972). *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press.
- Hardiman, Fransisco B (1993). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hawking, Stephen W. (2019). *Sejarah Singkat Waktu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hawking, Stephen W & Mlodinow, Leonard. (2010). *The Grand Design*. New York: Bantam Books
- Hoffer, E., & Gresham, W. L. (1958). *The true believer: Thoughts on the nature of mass movements*.
- Howe, Leo, *Hinduism & Hierarchy in Bali*, School of American Research Press, New Mexico, 2001.
- Huntington, Samuel P. (1997) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York Touchstone.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. London: Verso.
- Lenski, Gerhard (2005). *Ecological-Evolutionary Theory: Principles and Applications*. Colorado: Paradigm.
- Macionis, John J. (2012). *Sociology*. Boston: Pearson Education, Inc.
- McLuhan, Marshall (1957, March). *Classroom Without Walls*. *Exploration 7: Studies in Culture and Communication*, pp. 22-26.
- Marx, Karl, Friedrich Engels, C.J. Arthur, and Karl Marx (1972). *The German Ideology*. New York: International Publishers.
- Ogburn, William F (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B.W. Huebsch.
- Palguna, IBM Dharma. (2018). *Manusia Tattwa*. Bali: Sadampatyaksara
- Rena Nyoman, *I Gusti Bagus Sugriwa dalam Lintasan Sejarah Negara Indonesia dan Agama*, Makalah dalam seminar I Gusti Bagus Sugriwa dalam Lintasan Sejarah Pembangunan Indonesia dan Agama Hindu, Denpasar, 2019

- Robinson, Geoffrey, *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*, LKIS, 2005
- Rouf, Abdul. (2020). Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama. *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No.1. hal 105-140.
- Sukarno (1951). Ilmu dan Amal. Pidato Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa Ilmu Hukum, UGM.
- Surpi Aryadhana, Ni Kadek, *Membedah Kasus Konversi Agama di Bali: Kronologi, metode misi dan alasan di balik tindakan konversi agama dari Hindu ke Kristen dan Katolik di Bali serta pernik-pernik keagamaan di dunia*, Penerbit Paramita, Surabaya, 2011.
- Wijaya, Nyoman, *Apakah Agama Hindu Bali Modern Lahir dari Tantangan Pancasila dan Islam*, Seminar Kemerdekaan Identity, UGM, Yogyakarta, 2010.
- Zega, Yunardi. (2020). Radikalisme Agama dalam Perspektif Alkitab dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Shanan*. 4. 1-20. 10.33541/ shanan.v4i1.1765.

Tentang Penulis



ANAK AGUNG GDE NGURAH ARI DWIPAYANA lahir dari keluarga pewaris Puri Kauhan Ubud, pada tanggal 24 Februari 1972. Ari Dwipayana mendapat gelar doktor Ilmu Politik UGM pada 2013. Gelar tersebut didapat setelah sebelumnya memperoleh gelar Master Ilmu Politik di Program S2 Ilmu Politik UGM tahun 2003 dan menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM tahun 1995.

Sejak tahun 1997 sampai saat ini, Gung Ari bekerja menjadi dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Program Magister dan Doktor Ilmu Politik FISIPOL UGM. Mulai Januari 2026, Gung Ari dipercaya menjadi Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang merangkap menjadi Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UGM.

Untuk pengabdian di luar kampus, pada Januari 2003, Gung Ari mendirikan Yayasan Uluangkep—sebuah NGO yang bergerak dalam penelitian dan pemberdayaan desa adat di Bali. Sejak 2019, bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud menggelar festival tahunan *Sastra Saraswati Sewana* sebagai bentuk merawat, melestarikan, dan memajukan warisan budaya dan pengetahuan Bali dalam konteks masa kini. Sampai saat ini, Yayasan Puri Kauhan Ubud secara konsisten menggelar *Sastra Saraswati Sewana*, yang pada tahun 2026 mengambil tema: *Cakrawala Mandala Dwipantara*.

Sejak 2014 hingga 2024 Gung Ari aktif di pemerintahan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (2014-2015), Staf Khusus Presiden (2015-2019), dan Koordinator Staf Khusus Presiden (2019-2024). Selain itu juga menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, selama dua periode, dari 2014 hingga 2024.

Gung Ari juga juga mendedikasikan dirinya di dunia pemikiran. Jejaknya bisa ditemukan dalam karya-karya-nya, dalam bentuk buku, makalah, artikel sampai dengan status di Instagram, Facebook dan podcast untuk mengikuti era kekinian. Pemikirannya berwarna dalam berbagai spektrum; mulai dari tema politik, sosial sampai dengan budaya. Buku pertama yang pernah dipublikasi adalah *"Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah di Bali"*, diterbitkan pada tahun 2001. Pada bulan April 2004, terbit bukunya yang kedua *"Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota"*. Pada tahun 2005, terbit bukunya yang ketiga, *"GLOBALISM": Pergulatan Politik Representasi atas Bali"*.

Selain itu, Gung Ari juga menginisiasi sejumlah buku yang diterbitkan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud antara lain: *"Brahmasara Bhawana Mukti: Teknologi untuk Kemajuan Peradaban"*, (2025). *"Niti Raja Sasana: Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri"* (2024), *"Toya Uriping Bhuwana Usadhaning Sangaskara: Air Sumber Kehidupan, Penyembuh Peradaban"* (2023), *"Usadha Siddhi"* (2023), *"Wariga Siddhi"* (2023), *"Jaladhi Smreti: Menelusuri Pelabuhan Kuno di Ketewel dalam Ingatan Masyarakat dan Catatan Kolonial"* (2023), *"Nyapuh Tirah Campuhan: Jejak Peninggalan Masa Lalu di DAS Oos"* (2023), *"Mai Mabasa Bali: Kartun Strip Terpilih 2021"* (2021), *"Sastra Saraswati Sewana: Pamarisuddha Gering Agung: Karya-karya Terpilih"* (2021), *"Mulat Sarira untuk Bali Bangkit : Pabligbagan di Masa Pandemi"* (2021).

Atas pengabdian pada Bangsa dan Negara, Gung Ari mendapatkan anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Agustus 2023 dan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia dari DPP LVRI pada tahun 2024. Di bidang Kebudayaan, Gung Ari memperoleh Parama Bhakti Budaya dari Gubernur Bali pada tahun 2024.







Puri Kauhan Ubud

ပုရိကောဟနုဗုဒ္ဓ

www.purikauhanubud.org

email

info@purikauhanubud.org

facebook

Yayasan Puri Kauhan Ubud

youtube

Puri Kauhan Ubud TV

IG

[purikauhanubud](https://www.instagram.com/purikauhanubud)

ISBN 978-624-76483-2-5



9

786349

648325